

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG KHILAFAH
DALAM KITAB AL-AHKAM AS-SHULTHANIYYAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**DAVID HANIF
NPM.1521020201**

Jurusan :Siyasah Syar'iyyah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2019M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG KHILAFAH
DALAM KITAB AL-AHKAM AS-SHULTHANIYYAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**DAVID HANIF
NPM. 1521020201**

Jurusan : Siyasaḥ Syar'iyyah



**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H, M.M
Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2019M**

ABSTRAK

Islam memaknai kehidupan di dunia saling berkaitan antara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya (Allah s.w.t). AlQuran sebagai kitab suci yang terakhir yang diturunkan pada Nabi Muhammad S.A.W di tujukan untuk menyempurnakan akhlak manusia, mengatur tata cara bekehidupan yang baik sesuai ajaran Nabi. Namun Nabi Muhammad S.A.W tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana konsep bernegara, dari sinilah banyak timbul perdebatan tentang bagaimana cara membuat sebuah Negara yang baik setelah Nabi Muhammad S.A.W wafat. Setelah Nabi Muhammad S.A.W wafat banyak yang menafsirkan bagaimana konsep kepemimpinan yang baik tak terkecuali Al-Mawardi seorang imam besar ahli fiqh, ahli ushul fiqh, dan pakar tafsir. Beliau menafsirkan cara penyelenggaraan sebuah negara dalam buku *Al-Ahkam As-Shultaniyyah*. Permasalahan yang diteliti dalam masalah ini yaitu bagaimana *Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shultaniyyah* dan bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* tentang *Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shultaniyyah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *Khilafah* menurut Al-Mawardi dan untuk menganalisis *Fiqh Siyasah* terhadap konsep *Khilafah* menurut pemikiran Al-Mawardi berdasarkan prinsip-prinsip bernegara dan unsur yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi umat Islam khususnya di Fakultas Syariah. Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literature (kepustakaan) baik buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terdahulu setelah semua data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif analitik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa menurut Al-Mawardi sistem *Imamah* atau *Khilafah* itu di proyeksikan untuk menyelenggarakan sebuah negara dan seorang *imam* atau *Khalifah* dapat mengambil peran sebagai pengganti Nabi dalam memimpin negara, menjaga agama dan mengatur dunia. Dan Mawardi memasukkan beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, gagasan Al-Mawardi sekarang dipakai oleh banyak masyarakat modern yakni *Ahl Al-Aqdi Qa Al-Halli*.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisi Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah.**
Nama : **David Hanif**
NPM : **1521020201**
Jurusan : **Siyasah Syar'iyah**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

NIP. 195512251985031002

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

NIP. 197408162003122004

Ketua Jurusan Siyasah

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah**” disusun oleh Nama: David Hanif NPM: 1521020201 Program Studi : Siyasah Syar’ iyyah (Hukum Tata Negara). Telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, SHI. MHI (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.ag. (.....)

Penguji Pendamping I : Prof. Dr. H Faisal, S.H., M.H (.....)

Penguji Pendamping II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H (.....)

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ
فِیْهَا وَیَدۡسِفُکَۢ الدِّمَآءَ وَخَنۡ نُّسۡبِحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَۚ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

(QS. Al-Baqarah[02]:30)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Institute Ilmu Al-Quran),
H. 6

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah rasa syukur ku ucapkan kepada ALLAH S.W.T. yang telah memberiku rezeki kemudahan dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini dan ku persembahkan ini untuk orang-orang yang berpengaruh dan orang tersayang.

1. Kedua orang tua saya ayahanda Sikun Aryadi dan ibunda Sawiyah tercinta yang tak pernah lelah mengasuh, menyemangati, membiayai untuk menyelesaikan pendidikan ini agar menjadi insan yang berguna.
2. Kakakku Vika Seviko terima kasih karena selalu memberiku motivasi dan Adikku Tri Endah Sentia yang menjadi semangat ku semoga kelak bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya
3. Sahabat yang saya sayangi Donna Eriza Kharisma, Retno Ning Tyas, Kurniawan Lesmana, Miya Wulandari, Noni Amellia, Al-Apid yang selama ini telah susah senang bersama.
4. Rekan-rekan seangkatan (Siyasah 2015) dan saudara-saudaraku khususnya Siyasah A yang tidak akan saya lupakan, terimakasih untuk kebersamaan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya sehingga bisa menyelesaikan studi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 Febuari 1997. Dengan nama lengkap David Hanif. Putra kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Sikun Aryadi dan Sawiyah. Berikut riwayat pendidikan penulis:

1. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di SDN Bengkulu Rejo, Gunung Labuhan, Way Kanan.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 02 Gunung Labuhan, Way Kanan, selesai pada tahun 2012.
3. Melanjutkan pendidikan menengah di SMKN 01 Bukit Kemuning, Lampung Utara. selesai pada tahun 2015.
4. Dan pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Siyasaḥ Syari'ah.



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof, Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.H. Selaku ketua jurusan Siyasah, Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Frenki M.Si selaku Sekertaris jurusan Siyasah Syar'iyyah Fakultas syaria'ah.

5. Prof. Dr. H. Faisal, S.H, M.H. selaku Pembimbing I yang mengarahkan dan membimbing saya sehingga skripsi ini selesai
6. Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi motivasi penulisan skripsi ini hingga selesai
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah sehingga selesai.
8. Rekan-Rekan Mahasiswa/i Fakultas Syariah khususnya jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2019

DAVID HANIF

1521020201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
G. Signifikansi masalah	9
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Khilafah.....	13
B. Dasar Hukum Khilafah.....	17
C. Syarat-syarat Khilafah.....	25
D. Tujuan Khilafah.....	31
E. Kewajiban Khilafah.....	34
F. Tinjauan Pustaka	38

BAB III BIOGRAFI AL-MAWARDI

A. Al-Mawardi	41
1. Riwaya Hidup.....	41
2. Karya Ilmiah.....	48
B. Pemikiran Al-Mawardi Tentang Khilafah	50

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah	63
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah.....	70

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang *Khilafah* Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah” yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya) atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian ini sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²
2. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan, siapa yang bertanggung jawab atas kekuasaannya.³
3. Khilafah adalah wakil (pengganti) Nabi Muhammad S.A.W, setelah Nabi wafat (di urusan Negara dan agama) yang melaksanakan syari’at (hukum Islam) di kehidupan Negara.⁴

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 43.

³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lâmal- Muwaqqi’în`anRabbal-`Âlamîn*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 54.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*....., h. 563.

4. Kitab *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah* adalah Kitab karya dari Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Pada penulisan skripsi ini terdapat beberapa alasan yang menarik perhatian penulis untuk mengangkat masalah dalam judul sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Penelitian dilakukan untuk menganalisis Fiqh Siyasah terhadap konsep *Khilafah* menurut pemikiran Al-Mawardi berdasarkan prinsip-prinsip bernegara dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

2. Alasan Subjektif

Pembahasan ini belum pernah dibahas khususnya dalam bentuk skripsi dan penulis merasa mampu dikarenakan banyak sumber yang tersedia

C. Latar Belakang Masalah

Islam memaknai kehidupan di dunia saling berkaitan antara hubungan manusia dengan sang maha pencipta (Allah s.w.t) dan hubungannya dengan manusia dalam bermasyarakat dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaannya.⁶

⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, (Bekasi: Darul Falah, 2014), h. xix

⁶ Totok dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.63.

Sebagai Kitab Suci terakhir yang ditujukan untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat manusia di seluruh waktu dan tempat, AlQuran sepatutnya diterjemahan dan ditafsirkan sesuai dengan zamannya. Dalam rangka penterjemahan dan penafsiran Al-Quran, berbagai upaya telah dikerahkan dari berbagai pihak terutama dari mereka yang memiliki basis keilmuan keagamaan yang mumpuni. Munculnya berbagai penafsir AlQuran menyertakan munculnya berbagai metodologi penafsiran, karena para penafsir memiliki kecenderungan dan perangkat-perangkat keilmuan yang berbeda.

Metodologi penafsiran AlQuran sepanjang sejarah telah mengalami *improvisasi*, sedemikian rupa baik menyangkut corak, pendekatan, maupun metode itu sendiri. Hal ini karena setiap zaman yang melahirkan mufassir memiliki karakteristik dan kecenderungannya masing-masing.

Al-Mawardi yaitu tokoh pembaharuan Islam. Al-Mawardi adalah orang mufassir AlQuran yang dengan daya dan upayanya telah menafsirkan AlQuran dengan pendekatan sosial kemasyarakatan yang diunggulkannya. Satu hal yang sangat menonjol dari pemikiran Al-Mawardi adalah upaya untuk mengaitkan penafsiran AlQuran dengan kehidupan riil masyarakat. Hal ini karena menurut Al-Mawardi keterbelakangan umat Islam disebabkan oleh kebodohan dan kedangkalan pengetahuan mereka akibat *taqlid* dan pengabaian peranan akal.

Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*). Sebab, untuk

mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Sekadar contoh, untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan ketertiban, diperlukan suatu kekuasaan, baik organisasi politik atau negara.⁷

Reformulasi Islam menurut Mawardi sangat penting artinya dalam mana upaya tersebut diharapkan menjadi vitamin pencerahan berfikir. Dengan reformulasi Islam, Al-Mawardi mengidealkan suatu pemisahan yang esensial dari yang tidak esensial, mempertahankan aspek fundamental dan meninggalkan aspek aksidental warisan sejarah. Menurut Mawardi ada beberapa unsur yang harus dilakukan diantaranya: kembali kepada sumber yang murni yakni AlQuran dan Hadis, memberikan porsi yang cukup terhadap akal-pikiran dalam penafsiran serta penyesuaian terhadap logika zaman.⁸

Menurut Mawardi, AlQuran dan hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, tetapi ia menegaskan bahwa, pemikiran merupakan sarana terpenting guna memahami keistimewaan kandungannya (baca: tafsir). Dengan demikian, Mawardi tampak sangat menekankan peranan akal dalam mencari mutiara makna Al-Qur'an. Mawardi memang sangat mengedepankan peran akal dalam melakukan suatu pembaharuan bahkan, Mawardi membuat statemen yang tampak ekstrim dalam memuji peran akal seperti: manusia pada dasarnya mengetahui yang baik dan yang buruk dengan akalnya.⁹

Persoalannya Nabi tidak meninggalkan suatu pesan yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya bagaimana bentuk

⁷ Rasdha Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2017), h. 160.

⁸ *Ibid*, h. 160.

⁹ Abdullah Ali dan Mariana Aristyawati, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Serambi, 2006), h. 551.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۰

Karena ketidakjelasan inilah dapat dilihat praktek sistem negara Islam

Sementara Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi *Khilafah* yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna.

¹¹Al-Mawardi, *al-Hâwî al- Kabîr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), h. 55.

Penyelenggaraan negara di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya telah lebih jauh lagi dibandingkan dengan praktek di masa Nabi maupun *Khulafa' al-Rasyidun*. Pada masa ini dan berikutnya, pemerintahan telah berubah bentuknya menjadi monarkhi, yang dalam rangka suksesi tidak ada lagi bentuk musyawarah. Tradisi suksesi telah berubah dari pola musyawarah menjadi penunjukan terhadap anaknya atau keturunannya. Selanjutnya, di masa kemunduran Islam, umat Islam malah hampir tidak mempunyai negara ataupun pemerintahan Islam, karena kebanyakan bangsa muslim berada di bawah imperium Barat. Namun keinginan untuk mendirikan negara dan pemerintahan sendiri tetap ada. Karena itu dalam sejarah dapat terlihat di mana-mana umat Islam selalu memberontak untuk melepaskan diri dari penjajah.¹²

Berangkat dari pengalaman inilah sejumlah ilmuwan muslim maupun organisasi keislaman telah tampil dan berusaha merumuskan konsep-konsep dasar mengenai pemerintahan Islam. Al-Mawardi, Sesuai dengan latar belakang sosial politik yang berbeda, gagasan mereka tentang penerapan syari'at Islam ataupun sistem pemerintahan Islam berbeda pula.¹³

Gagasan-gagasan Mawardi terkait dengan penyakit yang dialami oleh umat Islam di akhir-akhir pemerintahan Khilafah Turki Usmaniyah berupa keterkungkungan di segala aspek kehidupan berikut solusinya yang tertuang dalam pemikirannya. Salah satu tema penting dalam pemikiran politik

¹² *Ibid*, h. 55.

¹³ Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dhahabi, *SiyarA'lâmal-Nubalâ*, dalam Syu'aibal-Arna'ut dan Muhammad Na'im al-Arqasusi (Eds.), (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1986), h. 64.

Al-Mawardi adalah masalah *Khilafah*. Dengan demikian, dalam tulisan ini akan mendiskripsikan penafsiran Al-Mawardi terhadap ayat-ayat yang secara etimologis dan terminologis terkait dengan *Khilafah*.¹⁴

Kembali kepada sumber murni dengan pendekatan logika zaman merupakan kunci utama menurut Mawardi untuk mereformulasi Islam sebab, pemahaman terhadap AlQuran tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Al-Mawardi berupaya mengajak kaum muslimin merefleksikan sejarah masa lalu. Menurut Al-Mawardi, para ulama yang hidup semasa dengan nabi tidak mengalami suatu perbedaan pandangan yang cukup banyak hingga melahirkan perpecahan. Tetapi pada era selanjutnya sejarah telah membuktikan betapa perbedaan pandangan yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok yang saling bertikai. Dengan refleksi sejarah tersebut Mawardi sesungguhnya ingin mengajak kaum muslimin keluar dari kubangan konflik pemahaman antar kelompok yang sebagian besar kalau tidak semua, kaum muslim di Mesir khususnya dan diseluruh penjuru dunia pada umumnya. Dalam Islam menurut Mawardi terdapat petunjuk umum yang menghendaki penafsiran ulang pada setiap zaman, dan bukan sebagai sebuah ketetapan yang bersifat abadi, yang menghendaki proses *blueprint* (cetak biru) secara mendetail bagi organisasi sosial dan politik. Penafsiran ulang dalam pemahaman Mawardi sudah tentu tidak melibatkan paham kelompok klasik yang cenderung berseteru akan tetapi, bagaimana kaum muslim mempergunakan akalanya dalam meraih pemahaman yang baru sesuai dengan konteks zamannya. Dan walaupun mau melibatkan

¹⁴Mochtar Efendy, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, (TK: Universitas Sriwijaya, 2001), h. 399.

tradisi penafsiran klasik, porsinya dibatasi agar tidak terjebak pada lingkaran berfikir yang sama. Pernyataan Mawardi tersebut sesungguhnya sekaligus mengkritik kaum muslimin yang menerima secara kuat dan mengikat, keahlian para tokoh muslim masa silam sebagai sebuah ketentuan agama untuk segala zaman. Lebih lanjut Mawardi menegaskan bahwa AlQuran dan hadis harus selalu diterapkan dalam urusan peribadatan, keputusan individu, atau ijtihad. Ini sangat penting menurut Mawardi untuk menata hubungan-hubungan sosial yang hanya dicapai dengan ide-ide rasional yang bersifat umum dan dengan pertimbangan etika kemanusiaan. Pemikiran Mawardi tersebut merefleksikan sebuah gagasan masa depan umat Islam.¹⁵

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini,. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti konsep *Khilafah* menurut Al-Mawardi dan bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap konsep *Khilafah* menurut Al-Mawardi.

E. Rumusan Masalah Penelitian Ini Adalah

1. Bagaimana konsep *Khilafah* Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap *Khilafah* Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah?

¹⁵*Ibid*, h. 398.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami *Khilafah* Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah.
- b. Untuk menganalisis Fiqh Siyasah terhadap *Khilafah* Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah.

G. Signifikansi Masalah

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui konsep Khilafah menurut Al-Mawardi dalam membangun sebuah negara agar dapat mensejahterakan umat dan mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap konsep Khilafah menurut Al-Mawardi.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai konsep *Khilafah*, secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul lebih kritis dan untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar sarjana S1.

H. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang terpercaya, dan kemudian dikembangkan secara sistematis sebagai suatu rencana untuk menghasilkan data tentang

masalah penelitian tertentu.¹⁶ Supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepuustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu”.¹⁷ Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat dan teori-teori yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan ini.
- b. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.¹⁸ Dengan cara mengumpulkan data-data tentang analisis *Fiqh Siyasah* terhadap konsep *Khilafah* menurut pemikiran Al-Mawardi.

2. Sumber Data Penelitian

- a. Jenis-jenis data dalam penelitian ini meliputi:

¹⁶ Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 10.

¹⁷ Susiadi AS, *Metode penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h.10.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 30.

1) Data primer, bahan hukum yang mengikat berupa buku hasil karya Al-Mawardi yang membahas *Khilafah* yaitu Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah.

2) Data Sekunder, adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melengkapi suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber pendukung yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal, dokumentasi maupun arsip serta yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

b. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Fiqh Siyasah, maupun AlQuran yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁹ Peneliti membaca, mencatat, mengutip karya-karya para penulis lain yang pembahasannya mendukung penelitian ini serta menyusun data yang diperoleh menurut fokus bahasan.

¹⁹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004), h. 73

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diolah dengan sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Periksa data (*editing*) yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Bertujuan mengurangi kesalahan saat pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.
- b. Sistematika Data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, kemudian data-data tersebut dianalisa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa Deskriptif Analitik yang berusaha menggambarkan, menganalisa terkait konsep *Khilafah*. Metode ini digunakan untuk memahami pemikiran dan konsep *Khilafah* menurut Al-Mawardi. Sedangkan pendekatan historis (*history approach*) dipakai untuk memahami dan mengungkapkan sejarah dan latar belakang kehidupan dan pemikiran Al-Mawardi.

BAB II

LANDASAN TEORI

I. Pengertian Khilafah

Khilafah menurut bahasa merupakan *mashdar* dari kata kerja *khalafa*. Dikatakan: *Khalafahu-khilafatan*, artinya sebagai pelanjut sesudahnya. Bentuk jamak daripadanya adalah: *Khalaif* dan *khulafa*.²⁰ *Khalifah* “penerus Nabi” merupakan jabatan yang dipangku para Sahabat setelah Nabi wafat. Pengertian penerus Nabi pun bukanlah siapa yang akan menggantikan Muhammad sebagai Nabi, melainkan menggantikan sebagai pemimpin umat. *Khalifah* merupakan singkatan dari *Khalifah Rasulillah*. *Khalifah* adalah penguasa tertinggi. *Khilafah* adalah pemerintahannya.²¹

Sedangkan *al-Khilafah* menurut istilah yaitu kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi SAW. Dalam hal ini Ibnu Khaldun berkata “*Al-Khilafah* adalah membawa seluruh manusia sesuai dengan tuntutan syara’ demi kemaslahatan ukhrawi dan duniawi mereka. Dalam hal ini dunia tidak terkecuali, karena seluruh ihwal dunia juga dalam pandangan syara’ dianggap sebagai sarana untuk meraih kemaslahatan akhirat. Dengan demikian, hakikat

²⁰ Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Aspeknya*, Jilid I dan II (Jakarta: UI-Press, 1979), h.11

²¹ Ratu Suntiah dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), cet. 1. h. 67-68

seorang *Khalifah* adalah sebagai pengganti dari pemilik syara' (Allah SWT) yang disertai amanat untuk menjaga agama dan politik dunia.²²

Khilafah (keKhalifahan) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sesuatu yang dicadangkan agar seseorang menjadi pelanjut atas seseorang. Atas dasar ini, maka orang yang menjadi pelanjut Rasulullah dalam melaksanakan hukum syara' disebut *Khalifah*. *Khalifah* juga dinamai dengan imam, karena seorang *Khalifah* menyerupai seorang imam dalam shalat yang harus diikuti dan diteladani oleh makmum. Imam An-Nawawi menjelaskan seorang imam boleh disebut *Khalifah*, imam, dan amirul mu`minin. Sementara itu Ibnu Khaldun menyatakan ketika hakikat kedudukan ini sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa imamah adalah wakil dari pemilik syariat dalam hal menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama, maka ia disebut Khilafah dan imamah. Sedangkan orang yang melaksanakannya disebut Khalifah dan imam". Pendapat ini diambil oleh Muhammad Najib al-Muthi'i dalam *at-takmilah lil majmu' lin nawawi* dalam buku ini beliau menjelaskan bahwa imamah, Khilafah dan *amirul mu`minin* adalah sinonim.²³

Istilah *Khilafah* mengandung arti perwakilan, pergantian, atau jabatan Khalifah. Istilah ini berasal dari kata Arab, *khalf* yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa. Dalam perspektif politik sunni, Khilafah didasarkan pada dua rukun, yaitu: consensus elit politik (*ijma'*) dan pemberian legitimasi (*bay'ah*).

²² *ibid*, Hasan Ibrahim Hasan, cet. 1, h. 276-277

²³ Abdullah Ad-Damiji, *Imamatul Udzma Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, (Ummul Qura), h. 44

Karenanya ,setiap pemilihan pemimpin Islam, cara yang digunakan dengan memilih pemimpin yang ditetapkan oleh elit politik. Setelah itu, baru dibai'at oleh para rakyatnya. Cara demikian, menurut Harun Nasution tidak merupakan bentuk kerajaan, tetapi lebih cenderung kepada republik. Dalam arti, kepala Negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun-temurun.²⁴

Khilafah, salah satu produk pemikiran politik Islam klasik yang terus didengungkan hingga kini, harus diakui sebagai buah ijtihad brilian para sahabat dalam hal kepemimpinan politik pasca meninggalnya Nabi Muhammad. Meski tidak sepopuler pada masa pembentukannya, gagasan Khilafah terus digulirkan oleh kelompok umat Islam yang dijangkiti gambaran ideal kejayaan Islam masa silam. Hal ini dilakukan sebagai respon dari keterbelakangan umat Islam ditengah belantara peradaban Barat. Bagi para pengusungnya, mengembalikan kedigjayaan Khilafah Islam merupakan jalan terbaik, bila umat Islam tak ingin terus dikuasai dan dihegemoni oleh kekuatan asing.²⁵ Secara tegas AlQuran menggunakan ungkapan *ulual-amr* untuk konsep pemegang dan pengendali kekuasaan politik.

Meskipun begitu para ulama tidak sependapat mengenai konsep yang dimaksud karena terpengaruh oleh perkembangan dan pemikiran politik zamannya. Pemerintah sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut wali atau "amir" atau dengan istilah lainnya yang dikenal dalam kepustakaan politik dan ketatanegaraan Islami.

²⁴ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera (Anggota IKAPI), 2001, h. 30.

²⁵ Khamami Zada dan Arief R Arofah, *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP, 2004, h. 48

Kriteria atau sosok seorang pemimpin sebagaimana terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah. Minimal ada empat kriteria yang harus dimiliki dalam diri seorang pemimpin. Semuanya terkumpul di dalam empat sifat yang dimiliki oleh para Nabi/Rasul sebagai pemimpin umatnya, yaitu:

1. Shidiq, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya.
2. Amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah SWT.
3. Fathonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul.
4. Tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi).²⁶

Sir Thomas Arnold menyebutkan beberapa aspek yang bermiripan dan berlainan di antara dua sistem pemerintahan yang pernah berdiri pada abad pertengahan: Kedua sistem tersebut adalah sistem keKhalifahan di Timur dan sistem kekaisaran di Romawi yang dikuduskan di Barat, seraya berkata “kedua sistem tersebut bersandar pada kekuatan agama, dimana keduanya bersifat internasional yang berorientasi agar dunia bergabung dan berada di bawah benderanya. Hal ini sesuai dengan apa yang kita temukan di Barat bahwa di sana terdapat dua penguasa salah satunya adalah penguasa zamani

²⁶ Tusriyanto, “Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab”, dalam *Jurnal Akademika*, Vol. 19, No. 01, Januari -Juni 2014, h. 130-132

(penguasa yang dibatasi oleh waktu) yaitu kaisar. Sedangkan yang kedua yaitu penguasa yang bersifat spiritual yaitu Paus. Sedangkan kekhalifahan tidak didirikan berdasarkan sistem politik sebelum kekhalifahan lahir. Sebab, kekhalifahan adalah merupakan sistem baru yang diciptakan oleh situasi dan kondisi yang muncul sesudah Islam lahir dan sesudah bangsa Arab berkuasa atas negeri Persia.

Seorang Khalifah adalah sebagai penguasa zamani dan spiritual dimana sebagai penguasa keagamaan dia tidak melampaui dari sebagai pemelihara agama. Kemudian sebagai pelindung agama dia berhak untuk menyatakan perang kepada orang-orang kafir dan menghukum orang-orang yang menentang agama, juga berhak mengimami orang-orang dalam shalat dan menyampaikan khutbah Jum'at. Hal ini berbeda dengan posisi Paus yang hanya dianggap sebagai pendeta paling tinggi yang berwenang mengampuni kesalahan orang-orang berdosa dan sebagai rujukan tertinggi dalam urusan-urusan agama.²⁷

J. Dasar Hukum Khilafah

Aliran sunni menggunakan ijma' sebagai argumen tentang kewajiban mendirikan khilafah. Al-Mawardi sebagai salah satu tokoh aliran ini berpendapat, bahwa menegakan lembaga Khilafah merupakan kewajiban umat islam menurut ijma'.²⁸ Dalam hal ini aliran

²⁷Moch. Fachrurroji, *Trilogi Kepemimpinan Islam.....*, h. 276-277

²⁸Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al- Sulthaniyah wal Wilayatu al- Diniyah*, Beirut Darul Fikr, 1960, h. 5

sunni mengatakan, telah terbukti bahwa para sahabat ketika mendengar berita wafatnya Nabi Muhammad, langsung berinisiatif mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Saidah. Turut serta dalam pertemuan itu para pembesar anshar dan muhajirin. Mereka meninggalkan perkara-perkara penting bagi mereka, diantaranya mempersiapkan pemakaman nabi Muhammad dan pergi membicarakan pengganti beliau. Meskipun berbeda pendapat mengenai siapa yang akan mereka bai'at, namun mereka sepakat ijma tentang wajibnya mengangkat Khalifah atau pemimpin. Selan ijma sunni juga mendasarkan argumennya pada kemasahatan umat. Mereka mengatakan kewajiban menegakan lembaga Khilafah didasarkan pada mencegah kekacauan dan keinginan mereka untuk menjalankan prinsip ajaran agama Islam.²⁹

Terdapat banyak sekali ayat Alquran bernuansa politik. Ayat tersebut merupakan indikator keniscayaan mengangkat kepala negara baik yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan Agama. Dalam konsep kepemimpinan Islam, syariat telah mengatur tentang pentingnya mengangkat Khalifah seperti yang terdapat dalam ayat (Al-Baqarah [2]30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya

²⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-5, 2002, h. 215.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Institute Ilmu Al-Quran), h. 6

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Ayat diatas menunjukan manusia telah diberi tugas dan amanat untuk memelihara tata kehidupan di dunia, agar keteraturan dan keseimbangan dalam kepentingan, tujuan dan tugas manusia di dunia. Maka dituntut adanya keseriusan melakukan penataan secara teratur dan seimbang.

Dalam surat yang lain Allah berfirman:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا ذُۢسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

26. Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
(Qs. Shaad[38]26)

Ayat diatas menunjukan bahwa keberadaan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian dan menegangkat keadilan di Dunia.

Seperti yang penulis jelaskan dari beberapa ayat sebelumnya, yang menunjukan pentingnya mengangkat seorang kepala negara agar visi dan misi agama serta peradaban manusia bisa terwujud, menurut Al-

³¹ Ibid, h.454

Mawardi mengangkat kepala negara adalah kewajiban bagi umat Islam. Hal ini sebagaimana dalam Hadis nabi:

إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. Itulah amir yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. (HR Ibn Khuzaimah dan al-Hakim).³²

Mujar Ibnu Syarif, beliau merinci ada tujuh macam model pengangkatan Kepala Negara yang dipraktikkan di masa awal pertumbuhan Islam, meliputi metode penunjukan langsung oleh Allah, metode pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-'aqdi*, metode penunjukan melalui wasiat, metode pemilihan oleh tim formatur atau dewan musyawarah, metode revolusi atau kudeta, metode pemilihan langsung oleh rakyat, dan metode penunjukan berdasarkan keturunan.³³

Namun, Pada masa Khulafaur Rasyidin sistem pengangkatan Khalifah sedikitnya ada dua cara yang pertama yaitu dengan sistem *nash* dan pengangkatan (wasiat dari Khalifah sebelumnya) dan yang kedua pemilihan melalui dewan *syûrâ* atau pemilihan dari *ahlul halli wal 'aqdi*. Sebagian kalangan *ahlussunnah wal jamâ'ah* berpendapat bahwa adanya *nash* untuk Khalifah Abu Bakar dan Nabi sudah mewasiatkan Khilafah untuk Abu Bakar. Kalangan ini terbagi menjadi dua pendapat;

Pertama: mengatakan *nashkhofy* (samar) pendapat ini mengatakan adanya *nash* samar dan isyarat untuk Abu Bakar sebagai Khalifah sepeninggal Nabi

³² Ibnu Taymiyah, *As-Siyasah Al-Syar'iyah*, Mesir: Dar Al-Kitab, Cet. Ke-4, 1969, h,161

³³ Ihsan Nul Hakim, Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat”, dalam *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, h. 43-44

Muhammad SAW. Pendapat ini dinyatakan bersumber dari Hasan Al-Bashri dan sekelompok ahli hadis juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini mereka sandarkan kepada dalil berikut: Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami shalat.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَّرْنَا الْمُوَاطَّيَّةَ عَلَى
الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمِ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي
مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ
أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ
فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ إِنَّكَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ
بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خَفَّةً
فَخَرَجَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ رَجُلَيْهِ تَخْطُانِ مِنَ الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ
يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَكَانَكَ ثُمَّ أَتَى بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى
جَنْبِهِ قِيلَ لِلْأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي
بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بَعْضُهُ وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي
بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا

“Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad berkata, "Kami pernah bersama 'Aisyah ketika kami menceritakan tentang masalah menekuni shalat berjama'ah dan mengutamakan. Maka Aisyah pun berkata, "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang sakit yang membawa pada ajalnya, waktu shalat tiba dan dikumandangkanlah adzan. Beliau lalu bersabda (kepada para isterinya): "Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat bersama orang-orang." Lalu dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya Abu Bakr adalah orang yang lemah dan mudah menangis (saat membaca Al Qur'an).Dia tidak akan mampu menggantikan posisi Tuan untuk memimpin orang-orang shalat." Beliau kembali mengulangi

ucapannya, dan mereka juga memberi jawaban yang sama. Hal itu terus berulang hingga tiga kali, akhirnya beliau pun bersabda: "Kalian ini seperti isteri-isteri Yusuf! Perintahkanlah Abu Bakr agar memimpin shalat." Maka keluarlah Abu Bakr memimpin shalat jama'ah. Beliau kemudian merasa agak segar badannya, sehingga beliau keluar ke masjid dengan diapit oleh dua orang, seolah aku kedua kaki beliau menyentuh tanah karena sakit. Melihat kehadiran beliau, Abu Bakar berniat untuk mundur namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencegahnya dengan isyarat agar ia tetap pada posisinya. Kemudian beliau di dudukkan di sisi Abu Bakar. "Dikatakan kepada Al A'masy, "Apakah beliau shalat kemudian Abu Bakar shalat mengikuti shalatnya beliau, dan orang-orang shalat dengan mengikuti shalatnya Abu Bakar?" Lalu Al A'masy menjawab 'Ya' dengan anggukkan kepalanya." Abu Daud juga meriwayatkannya dari Syu'bah dari Al A'masy sebagiannya, dan Abu Mu'awiyah menambahkan, "Beliau shalat dengan duduk di sebelah kiri Abu Bakar, sementara Abu Bakr shalat dengan berdiri." (HR. Al-Bukhari)³⁴

As-Suyuthi berkata "ulama mengatakan hadis ini merupakan dalil paling tegas yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terbaik secara mutlak paling berhak atas Khilafah dan paling utama memegang imamah³⁵.

Kedua: mengatakan adanya *nashsharih* (tegas) untuk Abu Bakar. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ahli hadis, inilah pendapat Ibnu Hazm az-Zahiri dan dikuatkan oleh Ibnu Hajar al-Haitami. Golongan ini menyandarkan pendapatnya pada dalil berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكَ وَأَدْعُو لَكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاتُّكَلِّيَاهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُظْنُكَ تُحِبُّ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَلْتُ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرَّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ

³⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Dâl Al-Âmiyah: 2015), Kitab: Adzan, Bab: Batasan Sakit untuk Tidak Menghadiri Shalat Jama'ah, Nomor Hadis: 624.

³⁵ Maria Ulfah, *Imamah atau Khilafah*, (Jakarta; Institut Ilmu Al-quran), h. 7.

الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَيَّي الْمَمْنُونَ ثُمَّ قُلْتُ يَا بِي اللّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ اللّهُ وَيَا بِي
الْمُؤْمِنُونَ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id aku mendengar Al Qasim bin Muhammad mengatakan, Aisyah radliallahu 'anha mengeluh; "Aduh (sakitnya) kepalaku!" Lantas Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berujar; "Kalaupun aku masih hidup, niscaya aku memintakan ampun untukmu dan mendoakan bagimu!" Lantas Aisyah mengatakan; 'Duhai malangnya, demi Allah, aku berprasangka engkau menyukai kematianku, kalaupun demikian, lebih baik akhir-akhir harimu menjadi pengantin di rumah salah satu isterimu.' Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyahut: "Bahkan aku, aduh sakitnya kepalaku! Saya berkeinginan sekali untuk mengutus utusan kepada Abu Bakar dan anaknya dan mewasiatkan (kekhilafahan kepadanya), (karena aku tidak suka) orang-orang berkata (Khalifah untukku atau untuk fulan) atau (karena khawatir) orang-orang mengangan-angankannya, kemudian aku katakan; 'Allah enggan (keKhilafahan untuk selain Abu Bakar), dan orang-orang mukmin menolak (selain dia), " atau dengan redaksi; "Allah menolak (selain dia) dan orang-orang mukmin enggan (keKhilafahan untuk selain Abu Bakar)." (HR. Bukhari)³⁶

Namun, Salihun A. Nasir di dalam bukunya mengatakan memang Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat Abu Bakar menjadi imam shalat pada waktu beliau sakit menjelang hari wafatnya. Demikian pula Nabi Muhammad SAW pernah menyuruh sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menjaga rumahnya ketika beliau pergi berperang. namun demikian, beliau tidak pernah menyebut-nyebut penggantinya.³⁷ Dikatakan juga oleh Hasan Ibrahim Hasan bahwa tidak diperoleh dengan jelas dan tegas *nash* dari Nabi SAW yang mengemukakan tentang siapa yang harus menjadi pemimpin sesudah beliau.³⁸ Dikatakan pula di oleh Rosi Susanti di dalam skripsinya bahwa Selama berpuluh-puluh tahun Rasulullah SAW mengemban tugas sebagai Kepala Negara hingga wafatnya, beliau sama sekali

³⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*...., Nomor Hadis: 6676

³⁷ Salihun A. Nasir, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam)*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), cet. 2, h. 75

³⁸ Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan islam*...., cet. 1, h. 298

tanpa meninggalkan perintah-perintah yang jelas ataupun calon-calon pengganti atau penunjukkan pengganti beliau. Karena tidak adanya isyarat-isyarat yang jelas, dan mengambil dasar pada perintah Al-Qur`an agar segala urusan umat diputuskan secara musyawarah, para sahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW, seleksi dan penunjukan Kepala Negara Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum Muslim yang harus dilaksanakan sejalan dengan jiwa perintah Al-Qur`an tersebut.³⁹

Adapun contoh dari pengangkatan Khalifah atau imam berdasarkan penunjukkan dari Khalifah sebelumnya adalah seperti pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat menjadi Khalifah melalui penunjukkan sesudah memusyawarahkan dengan kaum Muslimin. Ketika Abu Bakar sakit, sahabat yang ada berkumpul dan Abu Bakar bertanya kepada mereka: “Apakah kalian akan menerima orang yang saya akan calonkan sebagai pengganti saya? Saya bersumpah bahwa saya melakukan yang terbaik dalam menentukan hal ini, dan saya telah memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti saya.” Para sahabat menjawab: “Kami mendengar dan kami menaatinya.”⁴⁰

Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pengganti, walaupun Nabi Muhammad SAW. tidak melakukan hal itu menjelang wafatnya. Hal ini menurut Abd al-Wahhab al-Najjar, ketika Rasulullah SAW. wafat umat Islam terbagi menjadi dua kelompok dan menetapkan pemimpin mesti berasal dari kelompoknya. Hal itu

³⁹ Rosi Susanti, “Perjuangan HTI Dalam Mewujudkan Khilafah Islamiyah (Analisis Terhadap Aktivitas Akhwat HTI Mahasiswi UIN Suska Riau Periode 2013-2014)”. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2014, h. 34

⁴⁰ Ratu Suntiah dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), cet. 1. h. 80-81

terjadi karena Nabi SAW. tidak menentukan penggantinya sebelum wafat. Apabila Abu Bakar membiarkan kursi *Khilafah* (kepemimpinan) kosong ketika ia meninggal, maka umat Islam diperkirakan akan kembali pada perdebatan seperti terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Bahkan Jalaluddin As-Suyuthi menjelaskan bahwa kekosongan pemimpin akan melahirkan fitnah yang lebih parah dan lebih dahsyat dibandingkan dengan adanya fitnah dari orang-orang murtad.

Dalam rangka menjaga stabilitas Negara, agar umat Islam terhindar dari perpecahan maka penunjukkan Umar menjadi Khalifah dilakukan oleh Abu Bakar dan piagam penunjukkan itu dibuat sebelum beliau wafat.

Kebijaksanaan Abu Bakar diterima masyarakat dan segera membaiaatnya secara beramai-ramai. Umar menyebut dirinya *Khalifah khalifati Rasulillah* (pengganti dari pengganti Rasulullah).⁴¹ Beliau juga memperkenalkan istilah *Amirul Mu'minin* (komandan orang-orang beriman)⁴² dan tetap menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahannya.

K. Syarat-syarat Khilafah

Di dalam sistem Khilafah ada sebuah pranata yang disebut Majelis Syura, disebut juga *ahlul halli wal aqdi*. Di sebut *ahlul halli wal aqdi* karena mereka adalah kelompok keahlian yang berwewenang menyeleksi dan memilih pimpinan. Disebut Majelis Syura karena merupakan badan musyawarah atau badan

⁴¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 37

⁴² Ibnu Katsir, *Sejarah Lengkap Khulafa'ur Rasyidin*, Terj. Muhammad Ahsan bin Usman, (Cikumpa: Senja Media Utama, 2018) cet. 1, h. 233

legislatif.⁴³ Contoh pengangkatan Khalifah/imam dengan sistem ini adalah pengangkatan Utsman bin Affan.

Umar ra. menetapkan perkara pengangkatan Khalifah di bawah majelis syura atau tim formatur yang beranggotakan enam orang sahabat terkemuka, *ahlul halli wal 'aqdi* yang pertama dalam Islam⁴⁴ mereka adalah: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin 'Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf. Umar ra.merasa berat untuk memilih salah seorang di antara mereka.⁴⁵

Beliau berkata “Aku tidak sanggup untuk bertanggung jawab tentang perkara ini baik ketika aku hidup maupun setelah aku mati. Jika Allah SWT. menghendaki kebaikan terhadap kalian maka Allah akan membuat kalian sepakat untuk menunjuk seseorang yang terbaik di antara kalian sebagaimana telah membuat kalian sepakat atas penunjukan orang yang terbaik setelah Nabi kalian”.

Mereka bermusyawarah di rumah membicarakan tentang urusan ini hingga akhirnya hanya terpilih tiga kandidat saja. Zubair menyerahkan jabatan Khalifah kepada Ali bin Abi Thalib, Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf dan Thalhah kepada Utsman bin Affan. kemudian masing-masing mereka memberikan khutbahnya yang menyebutkan tentang keistimewaannya dan berjanji jika mendapat jabatan tidak akan menyimpang dan jika ternyata tidak maka ia akan mendengar dan menaati orang yang diangkat.⁴⁶

⁴³ Ihsan Nul Hakim, Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat”, dalam *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, h. 43-44

⁴⁴ Ratu Suntiah dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*....., cet. 1. h. 86

⁴⁵ *Ibid*, Ihsan Nul Hakim h. 38

⁴⁶ Ibnu Katsir, *Sejarah lengkap Khiulafaur Rhasidin*....., h. 412

Berdasarkan peninjauan pendapat yang dilakukan Abdurrahman bin Auf terhadap anggota formatur yang ada diperoleh dua calon Khalifah, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya musyawarahnya dewan formatur mengangkat Utsman bin Affan menjadi Khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat.⁴⁷

Khusus pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang menganut model pemerintahan monarki; majlis syûrâ tetap ada, tapi fungsinya tak ubahnya sekadar lembaga konsultasi yang tidak memiliki wewenang dalam mengangkat pemimpin pemerintahan. Meskipun memakai bungkus nama Khalifah, namun substansinya jauh berbeda dengan pemerintahan khulafa ar-rasyidin. Bila pada masa khulafaur rasyidin pengangkatan Khalifah ditentukan lewat pemilihan dan baiat, namun di masa Daulah Bani Umayyah dan Abbasiyah ditentukan oleh Khalifah sebelumnya atau diwariskan secara turun temurun.⁴⁸



Khilafah dalam Al-Qur`an dan Hadis

Kata imamah tidak disebutkan di dalam Al-Qur`an namun dalam surat Al-Baqarah [2]: 124 dan Al-Anbiya [21]: 73 disebutkan kata “imam” (pemimpin) dan “a’immam” (para pemimpin).

⁴⁷Ratu Suntiah dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam.....*, cet. 1. h. 86

⁴⁸Ihsan Nul Hakim, *Islam Dan Demokrasi.....*, h. 43-44

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾^{٤٩}

124. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim" Al-Baqarah [2]: 124

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾^{٥٠}

73. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah, (QS. Al-Anbiya [21]: 73

Sedangkan kata *khalifah* disebut sebanyak dua kali di dalam Al-Qur`an.⁵¹

Di antara ayat Al-Qur`an yang berbicara tentang *khalifah* adalah surat Al-Baqarah [2]: 30 yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾^{٥٢}

30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata,

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran Dan terjemahanya*....., h. 19.

⁵⁰ Ibid, h. 328.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 451

⁵² Departemen Agama RI, *Al-quran Dan terjemahanya*....., h.. 6

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. "(Qs. Al-Baqarah[2]30)

Menurut Mustafa Al-Maraghi *khalifah* adalah makhluk yang Allah diciptakan oleh Allah sebagai pengganti dari makhluk sebelumnya untuk melaksanakan perintah Allah terhadap umat manusia.⁵³ Sedangkan Ibnu Katsir mengartikan *khalifah* sebagai orang yang dapat memutuskan berbagai masalah pertengkaran yang terjadi dan membela orang yang teraniaya dan menegakkan hukum segala perbuatan yang keji dan munkar.⁵⁴

Kekhalifahan dalam arti kekuasaan politik dipahami juga dari ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak *khulafâ*. Diantara ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak adalah surat Al-A'raf [7]: 69 yaitu:

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ
وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً
فَاذْكُرُوا أَلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

69. Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-A'raf [7]:69)

Dalam ayat lain disebutkan:

⁵³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Ansori Umar dkk., (Semarang: Thoha Putra, 1989), h. 130-131

⁵⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Bahrin Abu Bakar, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), h. 369

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-quran Dan terjemahnya*....., h. 109

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ ۖ

مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا ۖ مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

“...dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai Khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya).” (QS. An-Naml [27]: 62)

Menurut para mufassir yang dimaksud dengan menjadikan manusia sebagai *khalifah* ialah menjadikan manusia berkuasa di bumi.⁵⁶

Beberapa Hadis tentang Khalifah.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوُسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ قُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَلَا أَوَّلَ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

“Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Furat Al Qazaz berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata; "Aku hidup mendampingi Abu Hurairah radliallahu 'anhu selama lima tahun dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bersabda: "Bani Isra'il, kehidupan mereka selalu didampingi oleh para Nabi, bila satu Nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan Nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada Nabi sepeninggal aku. Yang ada adalah para Khalifah yang banyak jumlahnya". Para shahabat bertanya; "Apa yang baginda perintahkan kepada kami?". Beliau menjawab: "Penuhilah bai'at kepada Khalifah yang pertama (lebih dahulu diangkat),

⁵⁶ Jazilul Fawaid, *Bahasa Politik Al-Qur'an Konsep dan Aktualisasinya dalam Sejarah*, (Depok: Penerbit Azza Media, 2017) cet. 2, h. 71

berikanlah hak mereka karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka". (HR. Al-Bukhari)⁵⁷

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَلَا مَأْمُورَ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'man) Telah menceritakan kepada kami (Hammad bin Zaid) dari (Ayyub) dari (Nafi') dari (Abdullah) ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalain akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas atas hartanya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya." (HR. Al-Bukhari. No)⁵⁸

L. Tujuan Khilafah

Menurut Hasan Al-Banna sebagaimana dikutipoleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, kewajiban atau tugas-tugas pemerintah Islam adalah pertama, menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang kedua, menyelenggarakan pendidikan ketiga, mempersiapkan kekuatan keempat, memelihara kesehatan kelima, memelihara kepentingan umum keenam, mengembangkan kekayaan

⁵⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Dâl Al-Âmiyah: 2015), Kitab: Hadis-Hadis yang Meriwayatkan Tentang Para Nabi, Bab: Bani Israil, Nomor Hadis: 3196

⁵⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari*....., Nomor Hadis: 4789

dan memelihara harta benda ketujuh, mengokohkan akhlak kedelapan, menyebarkan dakwah.⁵⁹

Adapun tujuan pendirian Negara dan pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara dan pemerintahan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.⁶⁰

Mendirikan *Khilafah* atau pemerintahan dalam pandangan para juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan, keagamaan dan untuk memelihara agama. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Kekuasaan politik harus dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan syari'at Islam, menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persamaan umat lewat kerjasama dan tolong-menolong, serta menciptakan keamanan dan ketenangan.⁶¹

M. Kewajiban Khilafah

Kewajiban lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan

⁵⁹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie alFaeda, Solo: Media Insani, 2003, hlm. 39.

⁶⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h.180.

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007, h.134.

agama. Lembaga pemerintahan juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.⁶²

Sejalan dengan persyaratan kepala pemerintahan, tugas dan tujuan utama pemerintahan dalam pandangan Ibn Taimiyah untuk melaksanakan syari'at Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir dan batin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat. Paradigma pemikirannya ini banyak disandarkan kepada ayat-ayat AlQuran dan hadits. Tidak berbeda dari pendahulunya, Ibn Khaldun menyatakan sesungguhnya kehidupan didunia ini bukanlah tujuan akhir dari keberadaan manusia. Kehidupan manusia didunia ini adalah satu *marhalah* yang dijalani menuju kehidupan lain, yaitu kehidupan akhirat. Undang-undang Islam yang bersifat politik menaruh perhatian terhadap kehidupan dunia, maka imamah, warisan yang ditinggalkan oleh Nabi adalah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁶³

Adanya lembaga-lembaga pemerintahan itu bukan saja karena kewajiban bermusyawarah, tetapi juga karena secara individual wali tidak akan mampu menangani urusan-urusan pemerintahan. Untuk itu ia memerlukan pembantu-pembantu dan secara bersama mereka merupakan sebuah badan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan.

Sesuai dengan fungsi-fungsi yang diselenggarakan, lembaga-lembaga tersebut dapat dipilah atas: (1) lembaga legislative (*majelistaqnin*), (2) lembaga eksekutif

⁶² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 260-261

⁶³ Abu A'la Maududi, *The Islamic Law And Constitution*, Terj. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam", Bandung: Mizan, 1990, h. 249.

(*majlistanfiz*), dan (3) lembaga yudikatif (*majlisqadha'i*). Lembaga yang pertama mempunyai dan menjalankan kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan berkenaan dengan masalah-masalah bukan akidah dan ritual dan yang tidak diatur secara tegas oleh AlQuran dan Sunah juga peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan hukum Allah. Sedangkan lembaga yang kedua mempunyai dan menjalankan kekuasaan untuk menerapkan hukum Allah dan hukum perundang-undangan. Yang terakhir mempunyai dan menjalankan kekuasaan untuk membela hukum-hukum positif dari setiap serangan dan pelanggaran.⁶⁴

Seperti telah dikemukakan, distribusi kekuasaan politik dapat dilihat dari dua segi *Pertama*, pembagian kekuasaan antara lembaga pemerintahan pusat pada satu sisi dan lembaga pemerintahan daerah pada sisi lain. Pembagian ini berkaitan dengan pembagian wilayah Negara dan kepentingan politik yang harus diselenggarakan oleh masing-masing peringkat pemerintahan. Oleh karena itu ia bersifat kuantitatif. *Kedua*, pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga pemerintahan setingkat yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh karena itu distribusi ini bersifat kualitatif. Secara teknis distribusi kuantitatif dapat disebut sebagai "pembagian kekuasaan" (*sharing powers*), dan pembagian kualitatif sebagai "pemilahan kekuasaan" (*separating powers*).

Pembagian kekuasaan politik berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan telah dikenal sejak zaman Yunani Klasik. Aris toteles telah mengemukakan tiga lembaga kenegaraan yang terdapat dalam konstitusi negara-negara Yunani yang diselidikinya, yaitu: 1) Lembaga pertimbangan warganegara (*deliberate body*)

⁶⁴ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyashah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 294

yang berfungsi antara lain menyelenggarakan kekuasaan legislatif, 2) Lembaga pemerintahan (*magistracy*) yang menyelenggarakan kekuasaan eksekutif, dan 3) sidang pengadilan (*the court of law*).

Keterangan ini tidak menegasi adanya pemusatan kekuasaan dalam tangan seorang kepala pemerintahan. Hal itu diketahui dari klasifikasi bentuk pemerintahan yang beracu pada dua aspek jumlah pemegang kekuasaan, dan tujuan pemerintah, kesejahteraan umum atau kepentingan pribadi.

Pemikiran tentang pemilahan kekuasaan dan juga pemisahannya di antara lembaga-lembaga yang berbeda ditemukan pula dalam pemikiran abad-abad XVII dan XIII seperti yang di kemukakan oleh John Locke dan Montesquieu (1689-1755). Pemikiran tersebut sebagai reaksi terhadap pemerintahan tirani pada zamannya. John Locke membedakan tiga macam kekuasaan politik atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, sedangkan Montesquieu mengemukakan pendapatnya yang memisahkan kekuasaan itu atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif dan meletakkan masing-masing kekuasaan tersebut dalam kewenangan lembaga yang berbeda. Dengan cara seperti ini lembaga-lembaga pemerintahan saling mengawasi sehingga penindasan terhadap rakyat dapat dihindari.⁶⁵

Pada sisi lain, Bentham dalam *Fragment on Government* (1776), seperti diungkapkan G.H. Sabine, mengemukakan bahwa upaya pembatalan kekuasaan seperti pernyataan tentang hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dan pengawasan serta keseimbangan sebagai teori yang keliru dan mengandung

⁶⁵*Ibid.* h.74-75

kegagalan-kegagalan dalam dirinya sendiri untuk dipraktekkan adalah rumusan formalitas dan alasan-alasan teknis dalam hukum. Kritikan Bentham ini tidak dijelaskan lebih lanjut oleh G.H. Sabine. Meskipun demikian dalam praktek politik, ajaran tersebut ternyata tidak berjalan sepenuhnya seperti yang terlihat dalam negara-negara Barat yang terpengaruhi oleh ajaran Trias Politika.⁶⁶

Apabila uraian diatas disimpulkan, dapat dikemukakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan politik dalam sebuah negara dapat berdasarkan doktrin absolutisme dan doktrin konstitusionalisme. Dalam doktrin pertama, pemerintah yang terdiri seorang raja atau diktator memiliki kekuasaan tak terbatas yang dapat dipergunakannya secara sewenang-wenang terhadap warga negaranya dan harta bendanya. Sedangkan doktrin kedua mengandung makna kekuasaan pemerintah dibatasi oleh prinsip-prinsip yang pasti yang terkandung dalam hukum dasar (konstitusi) negara. Dengan begitu hak-hak individu dan masyarakat dapat dipelihara karena terhindar dari perlakuan aniaya pemerintah.

Penyelenggaraan kekuasaan secara konstitusional ini mencakup pembagian kekuasaan dengan prinsip-prinsip sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi dan pemilahan kekuasaan atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka Negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas yang dimainkan negara dalam hal ini. *Pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Untuk

⁶⁶Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyashah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam AlQuran.....*, h.75-

melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislative (*al-sulthahal-tasyri'iyah*).⁶⁷ Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al- Quran dan hadits. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Sedangkan analogi adalah melakukan metode kias suatu hukum yang ada *nashnya*, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak Syari '(Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislative lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahlal-hallwaal-'aqd*. Kemudian dalam masa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). *Kedua* tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*).

Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (cabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007, h. 136.

negara dengan Negara Islam lainnya. Sebagai mana halnya kebijaksanaan legislative yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan. *Ketiga*, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthahal-qadha'iyah*).⁶⁸ Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah-*hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis) *wilayahal-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya ,baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).

N. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) untuk menjadi referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang dilakukan penulis.

⁶⁸ *Ibid. h. 137*

Tinjauan pustaka ini memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang hampir sama yakni membahas tentang pelayanan publik. Yang diantaranya sebagai berikut:

Karya yang membahas tentang Khilafah lain adalah jurnal karya Muhammad Amin yang berjudul *Pemikiran Politik Al-Mawardi* jurnal ini membahas tentang bagaimana pemikiran Al-Mawardi tentang Politik secara keseluruhan.⁶⁹

Jurnal karya Aulia Mustikawati yang berjudul *Konsep Politik Al-Mawardi Mengenai Kepala Daerah*, jurnal ini membahas tentang tata cara pemilihan kepala daerah dan di sandingkan dengan pemikiran Al-Mawardi.⁷⁰

Selanjutnya karya dari Ihda Roudhotul Ihsaniyah yang berjudul *Konsep Khilafah Dalam Pandangan Hitzbut Tahrir*, skripsi ini membahas tentang konsep Khilafah dalam pandangan Hitzbut Tahrir, tentang bagaimana penyelenggaraan sebuah negara berdasarkan syariat islam.⁷¹

⁶⁹ Muhammadd Amin, *Pemikiran Politik Al-Mawardi*, Jurnal Politik Profetik, 2016

⁷⁰ Aulia Mustikawati, *Konsep Politik Al-Mawardi Mengenai Kepala Daerah*, UIN Raden Fatah Palembang, 2016

⁷¹ Ihda Roudhotul Ihsaniyah, *Konsep Khilafah Dalam Pandangan Hitzbut Tahrir*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

BAB III

BIOGRAFI AL-MAWARDI

C. Al-Mawardi

3. Riwayat Hidup

Nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri.⁷² Mawardi dilahirkan di Bashrah pada tahun 370 H. atau 975 M. Panggilan Al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaianya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya.⁷³ Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecil Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa, Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah.

Selain sebagai pemikir dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Banyak karya-karyanya dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sastra, tafsir, dan politik. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas tentang teori politik bernegara dalam bingkai Islam dan orang pertama yang menulis tentang

⁷² Al-Mawardi, *Ahkam As-Shulthaniyyah*, Bekasi: Darul Falah, 2014, h. xxv.

⁷³ Imam Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Cet. ke-1, 1994, h. 55.

politik dan administrasi negara⁷⁴ lewat buku karangannya dalam bidang politik yang sangat prestisius yang berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniya*.

Al-Mawardi pada awalnya menuntut ilmu di Basrah. Ketika itu Basrah termasuk salah satu pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan di wilayah Islam. Namun Al-Mawardi masih belum puas dengan ilmu yang dimilikinya, hingga akhirnya ia melanjutkan studinya di Baghdad di Universitas al-Za'farani. Selanjutnya ia mengembara ke berbagai daerah, tetapi pada akhirnya kota Baghdad dipilihnya sebagai tempat tinggal dan mengajar di sana beberapa tahun. Di kota ini pula ia menghabiskan waktunya untuk menulis sejumlah buku dalam berbagai bidang.

Selain mendapat pendidikan di perguruan tinggi, ia masih belum merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya. Ia kemudian mempelajari berbagai disiplin keilmuan dari beberapa ulama terkemuka di Baghdad khususnya berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman ia mendalami mazhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakan di sebuah masjid yang terkenal dengan nama Masjid Abdullah ibn al-Mubarak di Baghdad. Sedangkan teologi yang dianut al-Mawardi adalah teologi Sunni. Karena gurunya kebanyakan dari golongan Sunni, maka corak pemikirannya mengarah ke Sunni.⁷⁵

⁷⁴ Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*. Terj. Imron Rosyidi "Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara", Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000, h. 37.

⁷⁵ Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, *Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia*, h. 486

Al-Mawardi belajar fiqh dari ulama terkemuka di Basrah yaitu Syekh ash-Shaimiri dan Syekh Abu Hamid (keduanya ahli hukum Islam). Sejak kecil ia sangat senang mendalami fiqh khususnya yang berkaitan dengan fiqh siyasi (tata negara dan pemerintahan Islam),⁷⁶ setelah dewasa ia menjadi Kadi yang terkenal (karena sering berpindah-pindah) pada masa pemerintahan Abbasiyah, al-Qadir (berkuasa 381 H/991 M-423 H/1031 M1). Karir al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi hakim agung (Qadi al-Qudat), penasehat raja atau khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan.

Ada masa pemerintahan khalifah al-Qadir, ia diberi kehormatan dan diangkat menjadi duta keliling yang diutus dalam berbagai misi diplomatik ke negara-negara tetangga. Ia memiliki pengaruh besar dalam menjaga dan memelihara wibawa khalifah al-Qadir di Baghdad yang merosot di tengah-tengah para raja dari Bani Saljuk dan Bani Buwaihi yang ketika itu hampir sepenuhnya berdiri sendiri.

Al-Mawardi di kemudian hari terkenal dengan karena pemikiran politik melalui bukunya yang berjudul *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* yang dianggap sebagai buku pertama yang disusun khusus tentang pemikiran politik Islam. Karya ini antara lain telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Perancis. Selain dari al-Ahkam as-Sulthaniyyah, terdapat beberapa karyanya tentang politik Islam, antara lain: *Qawanin al-Wizarah* (Ketentuan-Ketentuan Kewaziran/Kementerian), *Siyasah al-Mulk* (Strategi

⁷⁶Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al- Sulthaniyyah wal Wilayatu al- Diniyah*, Beirut: Darul Fikr, 1960, h. 57.

Kepemimpinan Raja), Adab ad-Dunya wa ad-Din (Tata Krama Kehidupan Politik/Duniawi dan Agamawi), Kitab al-Hawi (Yang Terhimpun), dan al-Iqna' (Keikhlasan) Berkaitan dengan sumber dan keterbatasan dalam menemukan buku-buku politik Al-Mawardi lainnya, maka dalam makalah ini hanya akan mengungkapkan pemikiran-pemikiran politik al-Mawardi yang terdapat dalam kitab al-Ahkam As-Sulthaniyyah.

Al-Mawardi hidup ketika kondisi sosial politik Dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu, khalifah-khalifah Abbasiyah benar-benar dalam keadaan lemah dan tidak berdaya.⁷⁷ Kekuasaannya hanya merupakan formalitas, sedangkan kekuasaan riil berada di tangan Bani Buwaihi dan orang-orang Turki. Awal kemunduran dari politik Bani Abbas adalah ketika Al-Mutawakkil berkuasa. Al-Mutawakkil adalah khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahannya orang-orang Turki dapat merebut kekuasaannya dengan cepat. Setelah al-Mutawakkil wafat, merekalah yang memilih dan mengangkat khalifah. Dengan demikian, kekuasaan tidak lagi berada di tangan Bani Abbas, meskipun mereka tetap memegang jabatan khalifah.

Situasi politik di dunia Islam pada masa Al-Mawardi, yakni menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M, tidak lebih baik dari masa al-Farabi, dan bahkan lebih parah. Kedudukan khalifah mulai melemah dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang

⁷⁷ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara.....*, h. 67

berkebangsaan Turki dan Persia. Mulai tampak pula bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal. Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima berkebangsaan Turki atau Persia, serta penguasa-penguasa wilayah. Meskipun makin lama kekuasaan para pejabat tinggi dan panglima non-Arab itu makin meningkat, sampai waktu itu belum tampak adanya usaha di pihak mereka untuk mengganti khalifah Arab itu dengan Khalifah yang berkebangsaan Turki atau Persia.⁷⁸

Namun demikian mulai terdengar tuntutan dari sementara golongan agar jabatan itu dapat diisi oleh orang non-Arab dan tidak suku Quraisy. Tuntutan itu sebagaimana dapat diperkirakan menimbulkan reaksi dari golongan lain, khususnya dari golongan Arab, yang ingin mempertahankan syarat keturunan Quraisy untuk mengisi jabatan kepala negara, serta syarat kebangsaan Arab dan beragama Islam untuk menjabat wazir atau penasehat dan pembantu utama khalifah dalam menyusun kebijaksanaan. Mawardi adalah salah satu tokoh utama dari golongan terakhir ini.⁷⁹

Apabila diperhatikan pendahuluan buku al-Ahkam as-Sulthaniyyah karangan Al-Mawardi, terlihat bahwa karya itu ditulis atas permintaan

⁷⁸ Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, *Pemikiran Poolitik Islam....*, h. 487

⁷⁹ Abdul Hayyie al-Khattami dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 16.

seorang yang berkuasa. Besar kemungkinan orang yang memintanya itu adalah khalifah Abbasiyah yang berkuasa saat itu. Motifnya barangkali adalah untuk mengembalikan kekuasaan riil kepada khalifah yang berada di tangan golongan Sunni.⁸⁰ yaitu kekuasaan Bani Abbas. Maka tidak mengherankan bila al-Mawardi tidak dapat menerima adanya dua orang kepala pemerintahan yang berkuasa dalam satu waktu di dunia Islam. Motif penolakan ini secara implisit untuk menentang pemerintahan bani Fathimiyah yang pada saat itu berkuasa di Mesir.

Sebagai reaksi terhadap situasi politik pada zamannya maka Al-Mawardi mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi misalnya dengan mempertahankan status quo. Dia menekankan bahwa khalifah harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy, bahwa wazir tafwidh (pembantu utama khalifah dalam penyusunan kebijaksanaan) harus berbangsa Arab, dan perlu ditegaskan persyaratan bagi pengisian jabatan kepala negara serta jabatan-jabatan pembantunya yang penting. Alasan utamanya tak lain adalah mengembalikan kekuasaan riil kepada khalifah Abbasiyah.⁸¹

Untuk mensiasati masa-masa sulit yang penuh dengan kekacauan ini, pada tahun 429H. khalifah al-Qadir mengumpulkan empat orang ahli hukum yang mewakili empat madzhab fiqh untuk menyusun ikhtisar. Di antaranya, Mawardi yang dipilih untuk mewakili madzhab Syafi'i

⁸⁰ Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, *Pemikiran Politik Islam.....*, h. 487-488

⁸¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*, dalam M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), h. 60.

dan menulis kitab al-Iqna'. Al-Quduri dipilih untuk mewakili Madzhab Hanafi dan menulis kitab al- Mukhtasyar, sedangkan dua kitab lainnya tidak begitu penting, dan Mawardi mendapat pengakuan dari khalifah atas karyanya yang terbaik. Untuk menghargai jasanya itu, Mawardi diangkat sebagai Aqdi al-Quddah (Hakim Agung) setelah menjadi hakim di beberapa daerah.⁸² Pengangkatan tersebut mendapat kritikan dan memunculkan keberatan oleh beberapa ahli hukum terkemuka seperti at-Thayib al-Thabari dan Al-Sinsari yang menyatakan, bahwa tak seorangpun berhak atas posisi itu kecuali Allah. Namun Mawardi tidak menghiraukan keberatan itu dan tetap mempertahankan pengangkatannya sebagai Aqdi al-Quddah dengan alasan bahwa para ahli hukum yang sama sebelumnya telah mengakui gelar al-Muluk al-A'zam (Raja Agung) bagi Jalal ad-Daulah, seorang pemimpin kaum Buwaiyah, meskipun Mawardi sendiri tidak mengakui secara positif kemegahan gelar tersebut.⁸³

Selain faktor suhu politik dan kondisi sosial, karakter pemikiran Mawardi juga terinspirasi oleh tokoh-tokoh klasik abad sebelum masehi, seperti Plato dan Aristoteles serta periode Islam klasik seperti Ibnu Abi Rabi. Hal ini terungkap dalam teori proses terbentuknya negara. Sebagaimana Plato, Aristoteles juga mengatakan, "*the people is zoonpoliticon*" artinya manusia sebagai makhluk politik yang mempunyai kecenderungan untuk berkumpul dengan sesamanya. Sedangkan Ibnu Abi Rabi berpendapat, bahwa manusia sebagai makhluk sosial

⁸² Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State.....*, h. 36.

⁸³ *Ibid.* h. 93

tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga mereka saling memerlukan, membantu, berkumpul dan menetap di suatu tempat.⁸⁴ Begitu juga Mawardi yang berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan, maka manusia atau masyarakat harus mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala negara. Namun Mawardi memasukkan nilai-nilai syari'at dalam teorinya tersebut.⁸⁵ Di antara beberapa pengaruh tersebut, yang paling besar adalah situasi dan kondisi pada masa itu.

4. Karya Ilmiah

Al-Mawardi merupakan penulis yang sangat produktif. Kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktifitasnya untuk berkarya. Al-Mawardi masih bisa mengajar dan membimbing para muridnya di samping menulis buku. Menurut sejarah, masih banyak buku karangannya yang belum ditemukan yang ia simpan dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan oleh muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan.⁸⁶

Menurut catatan sejarah, bahwa Al-Mawardi memiliki karya ilmiah tidak kurang dari 12 judul yang secara keseluruhan dapat dibagi dalam tiga kelompok pengetahuan.

Pertama, kelompok pengetahuan agama. Yang termasuk ke dalam kelompok pengetahuan agama ini antara lain kitab Tafsir berjudul *an-*

⁸⁴Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara.....*, h. 61

⁸⁵ Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam.....*, h. 15.

⁸⁶Al –Mawardi, *Al –Ahkam Al Sulthaniyyah, Alih bahasa Fadhli Bahri* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 9

nukat wa al-Uyun. Buku ini menurut catatan sejarah belum pernah diterbitkan. Namun, dalam kitab *an-nukat wa al-Uyun* berusaha menafsirkan makna dibalik ayat-ayat al-Qur'an secara jelas dan menggunakan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami oleh pembaca yang masih awam dalam bidang tersebut. Menurut penuturanya, "di dalam al-Qur'an ada ayat-ayat yang langsung bisa dipahami pembacanya dan ada pula yang tersirat maknanya. Sehingga memerlukan pengkajian, baik melalui akal (ijtihad) maupun melalui wahyu dan sunnah (naqli). Tafsir ini, selain merekrut pendapat ulama salaf dan khalaf dengan susunan bahasa yang indah, juga berusaha menampilkan berbagai pendapat tentang pentakwilan ayat-ayat al-Qur'an.⁸⁷

Kedua, buku berjudul *Al-Hawy al-Kabīr*, yaitu buku fiqh dalam mazhab Syafi'i yang memuat 4000 halaman dan disusun dalam 20 bagian. Masih dalam bidang pengetahuan agama, tercatat kitab *Al-Iqro'* yang berisi ringkasan dari kitab *Al-Hawy* dan ditulis dalam 40 halaman. Kemudian kitab *Adab al-Qaḍhi* yang naskahnya berada di perpustakaan Sulaimaniyah di Konstanturiyah dan kitab *Ilām an-Nubuwwah* yang naskahnya masih tersimpan di Dar al-Kutab al-Misriyah.⁸⁸

Ketiga, kelompok pengetahuan tentang politik dan ketatanegaraan. Buku yang termasuk dalam kelompok pengetahuan tentang politik dan ketatanegaraan ini adalah *Al-Ahkām al-Sulthānīyah*, *Nasihāt al-Muluk*, *Tashil an-Nazār a Ta'jil az-Zafar* dan *Qawānin al-Wizārah wa as-Siāsah*

⁸⁷ Suparman Sukur, *Etika Religius*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2004). h. 77-78

⁸⁸ *Ibid.* h. 41

al-Mālik. Kitab *Al-Ahkām as-Sulthānīyah* termasuk karya Al-Mawardi yang populer dikalangan dunia Islam.

D. Pemikiran Al-Mawardi Tentang Konsep Khilafah

1. Konsep Al-Mawardi tentang Khilafah (Pemimpin)

Mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa mengangkat kepala negara merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam komunitasnya. Secara implisit Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat AlQuran tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Meskipun demikian Islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang kepala negara, dan Nabipun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas tentang kepemimpinan bagi generasisesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya secara musyawarah untuk memilih orang yang mereka kehendaki.⁸⁹

Al- Mawardi berpandangan bahwa mengangkat kepala negara untuk memimpin umat adalah wajib berdasarkan pada Ijma.

ايند لآة سايسونيد لآة سار حيفتي بنلاة فلاخلة عوضومة مامالا، مصلا امه نعيشناو عامجلا ايبجاو ملا ايف. عو⁹⁰

Artinya : Kepemimpinan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan pengangkatannya untuk mendirikan ummat adalah wajib berdasarkan 'Ijma dan ketika bimbang atas mereka maka diam.

⁸⁹ Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islami: *al-Siyasy wa al-Diny wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1964, h. 428.

⁹⁰ Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al- Sulthaniyah Wal Wilayatu Al- Diniyah*,....., h. 5

Fakta sejarah politik Islam membuktikan, proses pengangkatan kepala negara setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang dimulai dari Abu Bakar sebagai khalifah pertama mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan dan pembaiatan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad melalui musyawarah, meskipun terjadi perdebatan yang sengit antara kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor.⁹¹

Kemudian terpilihnya Umar Ibn Khathab sebagai amirul mukminin setelah Abu Bakar melalui mandat yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Umar Ibn Khathab. Sedangkan pemilihan Usman Ibn Affan sebagai pengganti Umar Ibn Khathab melalui musyawarah ahlul halli wal aqdi (dewan pilih) yang ditunjuk oleh Umar.⁹² Sementara Ali Ibn Abi Thallib diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya setelah melalui pertikaian dan perebutan kekuasaan dengan Muawiyah. Adapun kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, tipu daya dan pemberontakan.⁹³ Kemudian ketika Muawiyah akan turun tahta, ia mengumumkan penggantinya kepada putranya (Yazid).⁹⁴ Sejak itu pula sistem pengangkatan kepala Negara dilakukan secara turun temurun (memberikan mandat kepada putra mahkota).

Khilafah (Kepemimpinan) Pada bagian awal dari kitabnya Al-Mawardi menyebutkan bahwa kekhalifahan dibentuk untuk menggantikan posisi

⁹¹ Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Rajawali Pers h. 35

⁹² *Ibid.* h. 5

⁹³ *Ibid.* h. 42.

⁹⁴ Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al- Sulthaniyah Wal Wilayatu Al- Diniyah*,....., h. 15.

kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Yang dimaksudkan oleh Al-Mawardi dengan Imam adalah khalifah, raja, sulthan atau kepala negara. Dalam hal ini Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Menurut Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Dalam teorinya al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw ketika memimpin negara Madinah selain sebagai pembawa ajaran Tuhan, juga sebagai pemimpin negara.

Dari sini Mawardi mencoba memberikan solusi untuk mengurangi otoritas kepala negara dan upaya menciptakan nuansa politik yang lebih demokratis dengan menciptakan blue print tentang prosedur pengangkatan kepala negara. Menurut Mawardi, untuk memilih dan mengangkat kepala negara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu;

- a. pertama, dengan cara dipilih oleh *Ahlul-Halli Wal-Aqdi*.
- b. kedua, dengan pemberian (penyerahan) mandat dari kepala negara terdahulu (sebelumnya).

2. Persidangan *Ahlul Halli wal Aqdi* Untuk Memilih dan Mengangkat Kepala Negara

a. Pengertian *ahlul halli wal aqdi*

Secara fungsional, dewan perwakilan umat yang pada gilirannya disebut *ahlul halli wal aqdi*, telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad telah meletakkan landasan filosofis sistem pemerintahan yang memiliki corak demokratis.⁹⁵ Hal ini tampak ketika Muhammad dalam memimpin negara Madinah, menghadapi persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut. Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak terorganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi ketika beliau menghadapi masalah yang tidak ada petunjuknya dalam Al-Quran. Sedangkan keanggotaan *Ahlul-Halli Wal-Aqdi* tidak melalui pemilihan secara seremonial, tetapi melalui seleksi alam. *Ahlul-Halli Wal-Aqdi* adalah para sahabat yang dipercaya oleh umat sebagai wakil mereka yang selalu diajak untuk bermusyawarah oleh Muhammad.

Mengingat pentingnya kedudukan *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*, maka Al-Mawardi menentukan syarat-syarat sebagai anggota *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*. Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:

1. Memiliki sifat 'Adil yang mencakup semua syarat-syaratnya

⁹⁵ Dhiyauddin ra'is, *An-Nazhariyatu As-Siyasatu Al-Islamiyah*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, teori politik islam, (jakarta: gema insani press, cet. Ke-1, 2001), h. 178

2. Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri Imam tersebut
3. Memiliki pendapat (ra'yu) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.⁹⁶

Karena Islam merupakan gerakan ideologis, maka fenomena yang melekat pada gerakan tersebut adalah bahwa orang-orang yang pertama ikut dalam gerakan tersebut dan orang-orang yang berjasa atas gerakan yang dilancarkan oleh Muhammad untuk ekspan dan menyebarkan ajaran Islam, dianggap sebagai sahabat sejati dan sekaligus sebagai penasehat Muhammad. Oleh karena itu, pemilihan ini tidak melalui pemilihan secara formal atau melalui pemungutan suara, tetapi secara alami melalui ujian praktek dan pengorbanan mereka terhadap gerakan Islam.

Dalam terminologi politik *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah dewan perwakilan (lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat. Dalam hal ini, Mawardi mendefinisikan *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagai kelompok orang yang dipilih oleh kepala negara untuk memilih kepala negara yang akan

⁹⁶ Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al- Sulthaniyyah wa Al- Wilayatu al-diniyyah.....*, h. 6

menggantikan kepala negara yang lama.⁹⁷ Namun Mawardi tidak menjelaskan tentang unsur-unsur dari *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

Abdul Karim Zaidan berpendapat, *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakilnya karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil dan kejernihan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.⁹⁸

Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, *Ahlul Halli Wal Aqdi* ialah para ulama, pemimpin, pemuka rakyat yang mudah dikumpulkan untuk memimpin umat dan mewakili kepentingan-kepentingannya.⁹⁹ Beberapa ulama yang lain memberikan istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* dengan sebutan *Ahlul Ikhtiyar*, yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memilih.¹⁰⁰

Muhammad Abduh berpendapat, bahwa *Ahlul Halli Wal Aqdi* sama dengan *ulil amri*,¹⁰¹ Lebih lanjut Abduh menjelaskan dengan lebih rinci beserta unsur-unsurnya dengan mengatakan, *Ahlul Halli Wal Aqdi* terdiri dari para amir, para hakim, para ulama, para

⁹⁷ Mahmud Yunus, *Qamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an, Cet. ke-1, 1973, h. 53.

⁹⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 67.

⁹⁹ Dhiyuddin Rais, *An-Nazhariyatu As-Siyasatu Al-Islamiyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani "Teori Politik Islam", Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001, h. 178.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 176

¹⁰¹ J. Suyuthi Pulungan, J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*....., h. 68.

pemimpin militer, dan semua pimpinan yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan public.¹⁰²

Pendapat yang sama di sampaikan oleh Rasyid Ridha, ia mengatakan bahwa ulil amri adalah ahlul halli wal awdi yang terdiri dari para ulama, para pimpinan militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para tokoh wartawan.¹⁰³ Al-Razi juga menyamakan pengertian ahlul halli wal aqdi dengan ulil amri. Demikian juga Al-Maraghi yang berpendapat sama dengan Abduh dan Ridha.¹⁰⁴

Ahlul Halli Wal Aqdi tidak lebih hanya sekedar alat legitimasi ambisi politik penguasa atas tindak tanduknya. Karena dipilih oleh penguasa, *Ahlul Halli Wal Aqdi* tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Keberadaannya tidak banyak membawa perubahan kembali ke tradisi syura yang efektif berjalan hanya selama masa *Al-Khulafa' Al-Rasyidun*.

Ahl *Al-Imamah* sebagai orang yang berhak menjadi pemimpin, menurut Al-Mawardi harus memiliki tujuh syarat:

- a) Sikap adil dengan segala persyaratannya
- b) Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berjihad
- c) Sehat pendengaran, pengelihatannya, dan lisannya
- d) Utuh anggota-anggota tubuhnya

¹⁰²*Ibid.* h. 91

¹⁰³Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu As-Siyasatu Al-Islamiyah.....*, h. 69

¹⁰⁴Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al- Sulthaniyah wal Wilayatu al- Diniyah.....*, h. 39

- e) memiliki wawasan yang baik untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum
- f) Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan menghadapi musuh
- g) Keturunan Quraisy.¹⁰⁵

Dalam mengangkat kepala pemerintahan terdapat dua cara. Pertama, cara pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang duduk dalam ahl al-halli wa al-'aqdi atau ahl al-ikhtiyar yakni para ulama cendikiawan dan pemuka masyarakat. Kedua, dengan cara penunjukkan atau wasiat oleh kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Kalau pengangkatan melalui pemilihan, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang jumlah peserta dalam pemilihan itu.

Metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat khalifah adalah sebagai berikut:

- a) Mahkamah Mazhalim mengumumkan kekosongan jabatan khalifah.
- b) Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu.
- c) Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syara-syarat in'iqaḍ dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat in'iqaḍ ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim.

¹⁰⁵Khalil Abdul Karim, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyah*. Terj. M. Faisol Fatawi "Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan", Yogyakarta: LKiS, Cet. ke-1, 2002, h. 15

- d) Para calon yang pencalonan nya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umayyah yang Muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama dipilih enam yang Muslim dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak.
- e) Nama kedua calon tersebut diumumkan. Kaum Muslim diminta untuk memilih satu dari kedua nya.
- f) Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu siapa calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- g) Kaum Muslim langsung membaiaat calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan Kitabullah dan Sunah Rasulnya.
- h) Setelah proses baiat selesai, khalifah kaum Muslim diumumkan keseluruhan penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama khalifah dan bahwa ia memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menjabat khalifah.
- i) Setelah proses pengangkatan khalifah yang baru selesai, masa sementara amir berakhir.¹⁰⁶

Menurut Mawardi, mengapa pengangkatan *Khalifah* dapat dilakukan dengan penunjukan atau wasiat oleh imam yang sebelumnya, dasarnya yang pertama adalah karena Umar bin Khattab menjadi

¹⁰⁶ Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, (Jakarta: HTI Press, 2002),h.342-348.

khalifah melalui penunjukkan oleh pendahulunya, yaitu Abu Bakar. Demikian pula halnya Usman. Enam anggota dewan formatur yang memilihnya sebagai khalifah adalah ditunjuk oleh pendahulunya, Umar bin Khattab. Dalam hal pengangkatan imam melalui penunjukan atau wasiat oleh imam yang berkuasa, Al-Mawardi menyatakan bahwa sebelum menunjuk calon penggantinya, seorang imam harus berusaha agar yang ditunjuknya itu benar-benar berhak untuk mendapatkan kepercayaan dan kehormatan yang tinggi dan orang yang betul-betul paling memenuhi syarat.

Jika yang ditunjuk sebagai calon pengganti itu bukan anak atau ayah sendiri, maka terdapat perbedaan pendapat, yaitu apakah imam boleh melaksanakan bai'at sendiri atau tidak. Sekelompok ulama berpendapat tidak boleh tidak dibenarkan imam seorang diri melaksanakan bai'at anak atau ayahnya sendiri. Dia harus bermusyawarah dengan *Ahl Al-Ikhtiyar* dan mengikuti nasehat mereka. Kelompok ulama kedua mengemukakan bahwa imam seorang diri berhak melaksanakan bai'at kepada anak atau ayahnya sendiri sebagai putra mahkota. Bukankah dia waktu itu pemimpin umat. Sedangkan kelompok yang ketiga berpendapat bahwa kalau yang ditunjuk sebagai putra mahkota itu ayahnya, imam dapat melaksanakan bai'at seorang diri. Tetapi tidak demikian halnya kalau yang ditunjuk sebagai putra mahkota itu anaknya.

Berdasarkan uraian tentang beberapa cara pengangkatan imam, baik yang melalui pemilihan maupun penunjukkan, Al-Mawardi hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan preferensi atau pilihannya. Sikap kehati-hatiannya tersebut didasarkan pada fakta sejarah yang menunjukkan tidak ditemukannya suatu sistem yang baku tentang pengangkatan kepala negara yang dapat dikatakan pasti bahwa itulah sistem Islami.¹⁰⁷

3. *Wizarah*

1. Tentang Wazir.

Al-Mawardi membagi wazir menjadi dua bentuk, pertama wazir tafwidh, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri. Karena besarnya kekuasaan wazir tawfidh ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. Kedua, wazir tanfidz, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir tawfidh. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.¹⁰⁸

Pada masa pemerintahan Al-Mu'tashir, ketika khalifah tidak begitu berkuasa lagi, wazir-wazir berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya

¹⁰⁷ Al- Mawardi, *Al- Ahkam Al- Sulthaniyah wal Wilayatu al- Diniyah*, h. 62

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 169-170

kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga khalifah hanya menjadi boneka¹⁰⁹

2. Teori Kontrak Sosial

Suatu hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi adalah hubungan antara Ahl al-‘Aqdi wa al-Halli atau Ahl al-Ikhtiyar dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Al-Mawardi mengemukakan teori kontraknya itu pada abad XI, sedangkan di Eropa teori kontrak sosial baru muncul untuk pertama kalinya pada abad XVI.¹¹⁰

Dalam hal ini Al-Mawardi mengatakan bahwa apabila Khalifah atau kepala negara telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada umat, berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggung jawab ummat. Dan saat yang demikian imam mempunyai dua

¹⁰⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*....., h. 172

¹¹⁰ Muhammad Amin, *Pemikiran Politik Al-Mawardi Pemikiran Politik Al-Mawardi*, (Makasar; Pasca Sarjana UIN Alauddin, 2016) H. 14

macam hak terhadap ummat, yaitu hak untuk ditaati dan hak dibela selama imam tidak menyimpang dari dari garis yang telah ditetapkan.

Sumber kekuasaan kepala negara adalah berdasarkan perjanjian antara kepala negara dengan rakyatnya (kontrak sosial). Dari perjanjian itu lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, rakyat yang telah memberikan kekuasaan dan sebagian haknya kepada kepala negara berhak menurunkan kepala negara, bila ia dipandang tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan teorinya ini.¹¹¹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa boleh dikatakan Al-Mawardi adalah seorang yang ahli dalam tata pemerintahan dan merupakan negarawan yang cemerlang dizamannya. Bahkan idenya banyak dipakai pada abad sekarang oleh negeri Arab.

Mawardi mencoba memberikan solusi untuk mengurangi otoritas kepala negara dan upaya menciptakan nuansa politik yang lebih demokratis dengan menciptakan blue print tentang prosedur pengangkatan kepala Negara.

Gagasan ketatanegaraan Al-Mawardi yang sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah ide tentang kontrak social, yakni hubungan antara *Ahlul Halli Wal Aqdi* dan Khalifah atau kepala Negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau

¹¹¹ *Ibid.* h. 15

perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.



BAB IV

ANALISIS DATA

C. *Khilafah Dalam Buku Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*

Secara psikologis maupun kodrati, setiap individu akan terbentuk oleh situasi dan kondisi lingkungan di mana ia hidup. Begitu juga karakter dan alam pemikiran Al-Mawardi sangat dipengaruhi oleh situasi politik pada masa itu. Konsep dasar hukum dan politik yang di gagas oleh Mawardi merupakan hasil dari sebuah pengalaman perjalanan hidupnya. Terjadinya pemberontakan, kudeta, kekacauan dan gangguan stabilitas negara, mengilhami Mawardi untuk menyumbangkan ide-ide politiknya dalam bingkai Islam. Banyak gagasan-gagasan yang ia tuangkan dalam bentuk buku terutama dalam ranah hukum dan politik sebagai upaya untuk mengatasi dan mengantisipasi kekacauan yang berkepanjangan tersebut.

Dengan adanya hukum dan aturan-aturan yang tegas dalam pemerintahan, dirahapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif dan setiap rakyat akan patuh pada hukum dan aturan-aturan tersebut. Seperti contoh, ketika terjadi pemberontakan dan tuntutan agar selain dari keturunan Quraisy orang bisa menduduki jabatan sebagai kepala negara, maka Mawardi memasukkan aturan hukum bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi kepala negara harus dari keturunan suku Quraisy.

Disamping itu selama dinasti Abbasiyah berkuasa, kepala negara dijabat oleh orang-orang Quraisy termasuk khalifah Al-Qadir pada masa Al-Mawardi. Dari

sini tampak bahwa pemikiran Al-Mawardi cenderung mendukung status Quraisy serta mempertahankan legalitas hegemoni Quraisy, hal ini disebabkan karena posisinya sebagai aparat Negara.

Selain faktor suhu politik dan kondisi sosial, karakter pemikiran Mawardi juga terinspirasi oleh tokoh-tokoh klasik abad sebelum masehi, seperti Plato dan Aristoteles serta periode Islam klasik seperti Ibnu Abi Rabi. Hal ini terungkap dalam teori proses terbentuknya negara. Sebagaimana Plato, Aristoteles juga mengatakan, *the people is zoon politicon* artinya manusia sebagai makhluk politik yang mempunyai kecenderungan untuk berkumpul dengan sesamanya. Begitu juga Mawardi yang berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan, maka manusia atau masyarakat harus mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala negara. Namun Mawardi memasukkan nilai-nilai syariat dalam teorinya tersebut.

Menurut Al-Mawardi, Khalifah itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) yang dimaksud ialah kepada orang yang mampu menjelaskan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan *ijma'* (konsensus ulama).

Tentang syarat-syarat menjadi kepala negara tidak disinggung secara jelas baik dalam Al-Quran dan sunnah. Hanya dalam hadits diterangkan bahwa seorang pemimpin harus dari suku Quraisy dan ini satu-satunya syarat yang dijelaskan oleh Nabi untuk menjadi seorang pemimpin.

Dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, ada kecenderungan mengutamakan orang-orang terdekat dengan Muhammad, memiliki tingkat keimanan dan

keshalehan yang tinggi serta dari kaum Quraisy. Hal ini dapat dilihat pada fakta terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pasca wafatnya Nabi Muhammad. Ia lebih pantas dan berhak untuk menggantikan Nabi (sebagai khalifah) dengan alasan bahwa dialah orang yang paling dekat dengan Nabi dan ia sering mewakili Nabi baik dalam urusan shalat (imam shalat) maupun dalam urusan umat dan dia dari suku Quraisy, demikian juga Khalifah Umar, Utsman dan Ali.

Dalam masalah ini Al-Mawardi memasukkan beberapa syarat yang harus dimiliki kepala negara. Menurut Mawardi, untuk dapat di calonkan sebagai kepala negara, maka seseorang harus memenuhi tujuh kriteria sebagai syarat yang harus dimiliki, yaitu;

1. Adil dengan syarat-syarat yang universal
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
3. Lengkap dan sehat fungsi panca indranya.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan bertindak
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat.
6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7. Mempunyai nasab dari suku Quraisy.

Mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa mengangkat kepala negara merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam komunitasnya. Secara implisit Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat AlQuran tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin.

Meskipun demikian Islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang kepala negara, dan Nabipun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas tentang kepemimpinan bagi generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya secara musyawarah untuk memilih orang yang mereka kehendaki.

Dalam buku *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah* Al-Mawardi membahas tiga pokok bahasan yang paling penting dalam sistem pemerintahan agar tercapai tujuan negara berdasarkan Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara dalam syariat Islam, yaitu apa itu *Khilafah*, *Ahlul halli wal-aqdi* dan *Wizarah*.

1. Khilafah

Khilafah mengandung arti perwakilan, pergantian, atau jabatan Khalifah. Istilah ini berasal dari kata Arab, *khalf* yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa. Dalam perspektif politik sunni, *Khilafah* didasarkan pada dua rukun, yaitu: consensus elit politik (*ijma'*) dan pemberian legitimasi (*bay'ah*). Karenanya, setiap pemilihan pemimpin Islam, cara yang digunakan dengan memilih pemimpin yang ditetapkan oleh elit politik. Setelah itu, baru dibai'at oleh para rakyatnya.

2. *Ahlul Halli Wal-Aqdi*

Secara fungsional, dewan perwakilan umat yang pada gilirannya disebut *ahlul halli wal aqdi*, telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad telah meletakkan landasan filosofis sistem pemerintahan yang memiliki corak demokratis. Hal ini tampak ketika Muhammad dalam memimpin negara Madinah, menghadapi persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut.

Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak terorganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi ketika beliau menghadapi masalah yang tidak ada petunjuknya dalam AlQuran. Inilah fenomena yang diyakini oleh para politikus Islam sebagai embrio lahirnya dewan perwakilan rakyat atau *ahlul halli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam.

Dalam hal ini, Mawardi mendefinisikan *ahlul halli wal aqdi* sebagai kelompok orang yang dipilih oleh kepala negara untuk memilih kepala negara yang akan menggantikan kepala negara yang lama.

3. *Wizarah*.

Al-Mawardi membagi wazir menjadi dua bentuk, pertama wazir *tawfidh*, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri. Karena besarnya kekuasaan wazir *tawfidh* ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang

kepercayaan khalifah. Kedua, wazir tanfidz, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan yang digariskan oleh wazir tawfidh. Ia tidak berwenang menentukan kebijakan sendiri

D. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Khilafah Al-Mawardi

Sebagaimana diketahui bahwa dunia Islam di masa lalu banyak menghasilkan tokoh dan pemikir-pemikir besar yang nama dan karyanya sampai sekarang masih dipakai dan dijadikan rujukan dalam menghadapi berbagai situasi dan persoalan yang terjadi dalam konteks kehidupan umat Islam.

Salah satunya ialah Al-Mawardi. Ia adalah seorang ahli fiqh khususnya berkaitan dengan fiqh siyasi dan termasuk salah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam. Dalam kitabnya yang terkenal *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* ia banyak memberikan teori-teori politik yang sampai saat ini masih relevan dan dipakai oleh sebagian umat Islam dalam mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan.

Al-Ahkam As-Sulthaniyyah demikian terkenalnya dan seringkali dianggap sebagai penjabaran paling benar dari teori politik Islam khususnya dari kalangan Sunni. Dalam sejarah Islam kitab ini merupakan risalah pertama yang ditulis dalam bidang ilmu politik dan administrasi negara secara terperinci. Namun jarang sekali dilakukan pengkajian yang mendalam tentang buku itu, kenapa buku itu ditulis, sumber yang digunakan dalam menulis buku itu, serta pengaruhnya

terhadap masanya dan masa berikutnya, adalah hal yang jarang dilihat dan dipermasalahkan.

Mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa mengangkat kepala negara merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam komunitasnya. Secara implisit Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat AlQuran tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Meskipun demikian Islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang kepala negara, dan Nabipun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas tentang kepemimpinan bagi generasisesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya secara musyawarah untuk memilih orang yang mereka kehendaki.

Fakta sejarah politik Islam membuktikan, proses pengangkatan kepala negara setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang dimulai dari Abu Bakar sebagai khalifah pertama mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan dan pembaiatan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad melalui musyawarah, meskipun terjadi perdebatan yang sengit antara kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor.

Kemudian terpilihnya Umar Ibn Khaththab sebagai amirul mukminin setelah Abu Bakar melalui mandat yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Umar Ibn Khaththab. Sedangkan pemilihan Usman Ibn Affan sebagai pengganti Umar Ibn Khaththab melalui

musyawarah ahlul halli wal aqdi (dewan memilih) yang ditunjuk oleh Umar. Sementara Ali Ibn Abi Thallib diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya setelah melalui pertikaian dan perebutan kekuasaan dengan Muawiyyah. Adapun kekhalifahan Muawiyyah diperoleh melalui kekerasan, tipu daya dan pemberontakan. Kemudian ketika Muawiyyah akan turun tahta, ia mengumumkan penggantinya kepada putarannya (Yazid). Sejak itu pula sistem pengangkatan kepala Negara dilakukan secara turun temurun (memberikan mandat kepada putra mahkota).

Imamah (Kepemimpinan) Pada bagian awal dari kitabnya Al-Mawardi menyebutkan bahwa imamah/ kekhilafahan dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Yang di maksudkan oleh al-Mawardi dengan Imam adalah khalifah, raja, sulthan atau kepala negara. Dalam hal ini Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Dalam teorinya Al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Rasulullah S.A.W. ketika memimpin negara Madinah selain sebagai pembawa ajaran Tuhan,

juga sebagai pemimpin negara. Dari sini Mawardi mencoba memberikan solusi untuk mengurangi otoritas kepala negara dan upaya menciptakan nuansa politik yang lebih demokratis dengan menciptakan blue print tentang prosedur pengangkatan kepala negara. Menurut Mawardi, untuk memilih dan mengangkat kepala negara dapat dilakukan dengan dua cara,

yaitu; pertama, dengan cara dipilih oleh ahlul-halli wal-aqdi, kedua, dengan pemberian (penyerahan) mandat dari kepala negara terdahulu (sebelumnya).

Secara fungsional, dewan perwakilan umat yang pada gilirannya disebut ahlul halli wal aqdi, telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad telah meletakkan landasan filosofis sistem pemerintahan yang memiliki corak demokratis. Hal ini tampak ketika Muhammad dalam memimpin negara Madinah, menghadapi persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut. Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak terorganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi ketika beliau menghadapi masalah yang tidak ada petunjuknya dalam AlQuran. Sedangkan keanggotaan mereka tidak melalui pemilihan secara seremonial, tetapi melalui seleksi alam.

Mereka adalah para sahabat yang dipercaya oleh umat sebagai wakil mereka yang selalu diajak untuk bermusyawarah oleh Muhammad.

Karena Islam merupakan gerakan ideologis, maka fenomena yang melekat pada gerakan tersebut adalah bahwa orang-orang yang pertama ikut dalam gerakan tersebut dan orang-orang yang berjasa atas gerakan yang dilancarkan oleh Muhammad untuk ekspansi dan menyebarkan ajaran Islam, dianggap sebagai sahabat sejati dan sekaligus sebagai penasihat Muhammad. Oleh karena itu, pemilihan ini tidak melalui pemilihan secara formal atau melalui pemungutan suara, tetapi secara alami melalui ujian praktek dan pengorbanan mereka terhadap gerakan Islam. Dengan demikian, dewan perwakilan umat tersebut terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang pertama masuk Islam yang setia mendampingi Muhammad, dan kelompok orang-orang yang memiliki jasa besar dengan wawasan dan kemampuan mereka. Inilah fenomena yang diyakini oleh para politikus Islam sebagai embrio lahirnya dewan perwakilan rakyat atau *ahlul halli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam.

Menurut terminologi politik *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah dewan perwakilan (lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat. Dalam hal ini, Mawardi mendefinisikan *ahlul halli wal aqdi* sebagai kelompok

orang yang dipilih oleh kepala negara untuk memilih kepala negara yang akan menggantikan kepala negara yang lama. Namun Mawardi tidak menjelaskan tentang unsur-unsur dari Ahlul Hall Wal Aqdi.

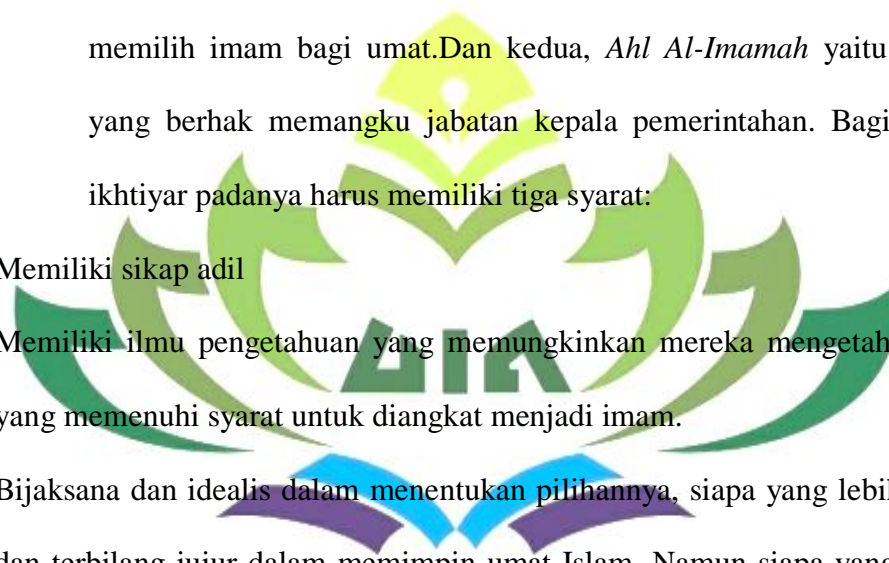
Abdul Karim Zaidan berpendapat, ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakilnya karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil dan kejernihan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Sedangkan menurut Imam an-Nawawi, ahlul halli wal aqdi ialah para ulama, pemimpin, pemuka rakyat yang mudah dikumpulkan untuk memimpin umat dan mewakili kepentingan-kepentingannya. Beberapa ulama yang lain memberikan istilah ahlul halli wal aqdi dengan sebutan ahlul ikhtiyar, yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memilih.

Muhammad Abduh berpendapat, bahwa *Ahlul Halli Wal Aqdi* sama dengan *ulil amri*. Lebih lanjut Abduh menjelaskan dengan lebih rinci beserta unsur-unsurnya dengan mengatakan, "Ahlul halli wal aqdi terdiri dari para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua pimpinan yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Rasyid Ridha, ia mengatakan bahwa ulil amri adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang terdiri dari para ulama, para pimpinan militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para tokoh wartawan. Al-Razi juga menyamakan pengertian *Ahlul Halli Wal Aqdi* dengan *Ulil Amri*. Demikian juga Al-Maraghi yang berpendapat sama dengan Abduh dan Ridha.

Cara Pemilihan atau Seleksi Imam Al-Mawardi mengemukakan pendapatnya tentang pemerintahan terbentuk melalui dua kelompok. Pertama ahl al-ikhtiyar yaitu mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Dan kedua, *Ahl Al-Imamah* yaitu mereka yang berhak memegang jabatan kepala pemerintahan. Bagi ahl al-ikhtiyar padanya harus memiliki tiga syarat:

- 
- a) Memiliki sikap adil
 - b) Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam.
 - c) Bijaksana dan idealis dalam menentukan pilihannya, siapa yang lebih pantas dan terbilang jujur dalam memimpin umat Islam. Namun siapa yang berhak menjadi anggota ahl al-ikhtiyar dan bagaimana cara rekrutmen anggota tersebut tidak dijelaskan lebih jauh oleh Mawardi.

Pada perkembangan sejarah selanjutnya, *Ahl Al-Ikhtiyar Atau Ahl Ahlul Halli Wal-Aqdi* bahkan berada dibawah pengaruh kepala negara, karena kepala negaralah yang mengangkat mereka. Oleh karenanya, mereka cenderung bersifat

akomodatif terhadap kekuasaan. *Ahlul Halli Wal-Aqdi* tidak lebih hanya sekedar alat legitimasi ambisi politik penguasa atas tindak tanduknya. Karena dipilih oleh penguasa, *Ahlul Halli Wal-Aqdi* tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Keberadaannya tidak banyak membawa perubahan kembali ke tradisi syura yang efektif berjalan hanya selama masa *Al-Khulafa' Al-Rasyidun*.

Ahl Al-Imamah sebagai orang yang berhak menjadi pemimpin, menurut Mawardi harus memiliki tujuh syarat:

- h) Sikap adil dengan segala persyaratannya
- i) Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad
- j) Sehat pendengaran, pengelihatan, dan lisannya
- k) Utuh anggota-anggota tubuhnya
- l) memiliki wawasan yang baik untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum
- m) Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan menghadapi musuh
- n) Keturunan Quraisy.

Pengangkatan kepala pemerintahan terdapat dua cara. Pertama, cara pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang duduk dalam *Ahl Al-Halli Wa Al-'Aqdi* atau *Ahl Al-Ikhtiyar* yakni para ulama cendikiawan dan pemuka masyarakat. Kedua, dengan cara penunjukkan atau wasiat oleh kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Kalau pengangkatan melalui pemilihan, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang jumlah peserta dalam pemilihan itu.

Metode untuk mengangkat khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat khalifah adalah sebagai berikut:

- j) Mahkamah Mazhalim mengumumkan kekosongan jabatan khalifah.
- k) Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu.
- l) Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syara-syarat in'iqad dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat in'iqad ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim.
- m) Para calon yang pencalonan nya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Ummah yang Muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama dipilih enam yang Muslim dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak.
- n) Nama kedua calon tersebut diumumkan. Kaum Muslim diminta untuk memilih satu dari kedua nya.
- o) Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu siapa calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- p) Kaum Muslim langsung membaiat calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan Kitabullah dan Sunah Rasulnya.
- q) Setelah proses baiat selesai, khalifah kaum Muslim diumumkan keseluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama khalifah dan bahwa ia

memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menjabat khilafah.

- r) Setelah proses pengangkatan khalifah yang baru selesai, masa sementara amir berakhir.

Menurut Al-Mawardi, mengapa pengangkatan imam atau khalifah dapat dilakukan dengan penunjukan atau wasiat oleh imam yang sebelumnya, dasarnya yang pertama adalah karena Umar bin Khattab menjadi khalifah melalui penunjukan oleh pendahulunya, yaitu Abu Bakar. Demikian pula halnya Usman. Enam anggota dewan formatur yang memilihnya sebagai khalifah adalah ditunjuk oleh pendahulunya, Umar bin Khattab. Dalam hal pengangkatan imam melalui penunjukan atau wasiat oleh imam yang berkuasa, Al-Mawardi menyatakan bahwa sebelum menunjuk calon penggantinya, seorang imam harus berusaha agar yang ditunjuknya itu benar-benar berhak untuk mendapatkan kepercayaan dan kehormatan yang tinggi dan orang yang betul-betul paling memenuhi syarat.

Jika yang ditunjuk sebagai calon pengganti itu bukan anak atau ayah sendiri, maka terdapat perbedaan pendapat, yaitu apakah imam boleh melaksanakan bai'at sendiri atau tidak. Sekelompok ulama berpendapat tidak boleh tidak dibenarkan imam seorang diri melaksanakan bai'at anak atau ayahnya sendiri. Dia harus bermusyawarah dengan ahl al-ikhtiyar dan mengikuti nasehat mereka. Kelompok ulama kedua mengemukakan bahwa imam seorang diri berhak melaksanakan bai'at kepada anak atau ayahnya sendiri sebagai putra mahkota. Bukankah dia waktu itu pemimpin umat. Sedangkan kelompok yang ketiga berpendapat bahwa kalau yang ditunjuk sebagai putra mahkota itu ayahnya, imam dapat

melaksanakan bai'at seorang diri. Tetapi tidak demikian halnya kalau yang ditunjuk sebagai putra mahkota itu anaknya.

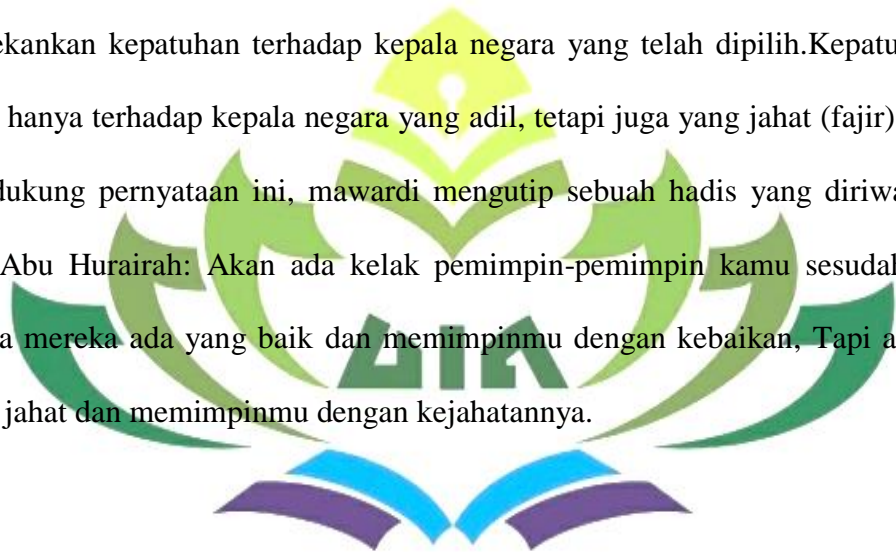
Berdasarkan uraian tentang beberapa cara pengangkatan imam, baik yang melalui pemilihan maupun penunjukkan, Al-Mawardi hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan preferensi atau pilihannya. Sikap kehati-hatiannya tersebut didasarkan pada fakta sejarah yang menunjukkan tidak ditemukannya suatu sistem yang baku tentang pengangkatan kepala negara yang dapat dikatakan pasti bahwa itulah sistem Islami.

Suatu hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan Al-Mawardi adalah hubungan antara *Ahlul Halli Wal-Aqd* dan kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Al-Mawardi mengemukakan teori kontraknya itu pada abad XI, sedangkan di Eropa teori kontrak sosial baru muncul untuk pertama kalinya pada abad XVI.

Dalam hal ini Al-Mawardi mengatakan bahwa apabila imam atau kepala negara telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada umat, berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggung jawab ummat. Dan saat yang demikian imam mempunyai dua macam hak terhadap ummat, yaitu hak

untuk ditaati dan hak dibela selama imam tidak menyimpang dari dari garis yang telah ditetapkan.

Sumber kekuasaan kepala negara adalah berdasarkan perjanjian antara kepala negara dengan rakyatnya (kontrak sosial). Dari perjanjian itu lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, rakyat yang telah memberikan kekuasaan dan sebagian haknya kepada kepala negara berhak menurunkan kepala negara, bila ia dipandang tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan teorinya ini, Mawardi tidak menganggap kekuasaan kepala negara sebagai sesuatu yang suci. Namun demikian, Mawardi juga menekankan kepatuhan terhadap kepala negara yang telah dipilih. Kepatuhan ini tidak hanya terhadap kepala negara yang adil, tetapi juga yang jahat (fajir). Untuk mendukung pernyataan ini, Mawardi mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: Akan ada kelak pemimpin-pemimpin kamu sesudahku. Di antara mereka ada yang baik dan memimpinmu dengan kebaikan, Tapi ada juga yang jahat dan memimpinmu dengan kejahatannya.



BAB V

PENUTUP

O. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Al-Mawardi memberikan solusi untuk sistem pemerintahan dan upaya menciptakan nuansa politik yang lebih demokratis dengan menciptakan cara tentang prosedur pengangkatan kepala negara. Menurut Al-Mawardi, untuk memilih dan mengangkat kepala negara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu; pertama, dengan cara dipilih oleh *Ahlul-Halli Wal-Aqdi*, kedua, dengan pemberian (penyerahan) mandat dari kepala negara terdahulu (sebelumnya), dalam Sistem *Khilafah* ada juga yang disebut dengan wazir yaitu orang yang dipilih untuk membantu *Khalifah*.
2. Dalam *Fiqh Siyasah* gagasan ketatanegaraan Al-Mawardi sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah ide tentang kontrak sosial, yakni hubungan antara *Ahlul-Halli Wal-Aqdi*, *Wazir* dan *Khailfah* atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.

P. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

5. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
6. Kriteria atau sosok seorang pemimpin sebagaimana terdapat dalam AlQuran dan As-Sunnah. Minimal ada empat kriteria yang harus dimiliki dalam diri seorang pemimpin. Semuanya terkumpul di dalam empat sifat yang dimiliki oleh para Nabi sebagai pemimpin umatnya, yaitu: Shidiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh. Konsep pemilihan kepala negara yang digagas oleh Al-Mawardi mencerminkan sistem tata kelola negara yang mengikuti sistem terdahulu, seperti halnya *Ahlul Halli Wal Aqdi* dan dewan pemilih. Perbedaan yang mencolok dari Mawardi dengan tokoh kenegaraan lainnya ialah pada konsep islam yang masuk dalam tata kelola negara, salah satu gagasannya dimuat dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* tentang pemilihan kepala negara, dimana pemikiran Al-Mawardi menjadi rujukan dibanyak universitas didunia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Nasir, Salihun, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam)*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), cet. 2

Abbas, Nurlelah, "Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme dalam Islam". *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, (01 Juni 2014: 51-58),

Abdul Karim, Khalil, *Quraissy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyah*. Terj. M. Faisol Fatawi "Hegemoni Quraissy: Agama, Budaya dan Kekuasaan", Yogyakarta: LKiS, Cet. ke-1, 2002,

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie alFaeda, Solo: Media Insani, 2003,

Ad-Damiji, Abdullah, *Imamatul Udzma Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, (Ummul Qura),

A'la Maududi, Abu, *The Islamic Law And Constitution*, Terj. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam", Bandung: Mizan, 1990,

Al-Bukhari, Ismail, Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Al-Bukhari*, (Dâl Al-Âmiyah: 2015), Kitab: Adzan, Bab: Batasan Sakit untuk Tidak Menghadiri Shalat Jama'ah, Nomor Hadis: 624.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al Sulthaniyyah*, Alih bahasa Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006),

-----, *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*, dalam M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991)

-----, *al-Hâwî al- Kabîr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994),

Amin, Muhammad, *Pemikiran Politik Al-Mawardi Pemikiran Politik Al-Mawardi*, (Makasar; Pasca Sarjana UIN Alauddin, 2016)

An-Nabhani, Taqiyyuddin, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, (Jakarta: HTI Press, 2002),

Aristyawati, Mariana, Abdullah Ali, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Serambi, 2006),

AS, Susiadi, *Metode penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015),

Departemen Agama RI, *Al-quran Dan terjemahnya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an),

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),

Diana, Rasdha, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Silam*, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2017),

Efendy, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (TK:Universitas Sriwijaya, 2001),

Fachrurroji, Moch, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008,

h. 298. Yang mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994),

Fawaid, Jazilul, *Bahasa Politik Al-Qur'an Konsep dan Aktualisasinya dalam Sejarah*, (Depok: Penerbit Azza Media, 2017)

Hadjar, Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999),

Ibrahim Hasan, Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003)

-----, *Tarikh al-Islami: al-Siyasy wa al-Diny wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1964

Imam Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Cet. ke-1, 1994,

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007,

J. Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002,

Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental*, Magelang: Yayasan n Indonesia Tera (Anggota IKAPI), 2001,

Katsir, Ibnu, *Sejarah Lengkap Khulafa'ur Rasyidin*, Terj. Muhammad Ahsan bin Usman, (Cikumpa: Senja Media Utama, 2018

-----, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Bahrn Abu Bakar, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978),

Khan, Qamaruddin, Al-Mawardi's Theory of the State. Terj. Imron Rosyidi "Kekuasaan, Pengkhia

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997),

Maslani, Ratu Suntiah, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017),

Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dhahabi, *SiyarA'lâmal-Nubalâ*, dalam Syu'aibal-Arna'ut dan Muhammad Na'im al-Arqasusi (Eds.), (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1986),

Muin Salim, Abdul, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,

Munir Amir, Samsul, Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009)

Musthafa Al-Maraghi, Ahmad, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Ansori Umar dkk., (Semarang: Thoha Putra, 1989),

Nul Hakim, Ihsan, Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat", dalam *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014,

Nurdin, Kamaluddin, Hayyie al-Khattami, Abdul dan *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),

Qayyimal-Jauziyah, Ibnu, *I'lâmal- Muwaqqi'în`anRabbal-`Âlamîn*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012),

Quraish Shihab, M. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007),

R Arofah, Arief, Khamami Zada, *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP, 2004,

Rais, Dhiauddin, An-Nazhariyatu As-Siyasatu Al-Islamiyah. Terj. Abdul Hayyie al- Kattani "Teori Politik Islam", Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001, h. 178.¹ Dhiaudin rais, *An-Nazhariyatu As-Siyasatu Al-Islamiyah*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, teori politik islam, (jakarta: gema insani press, cet. Ke-1, 2001),

Setiady Akbar, Purnomo, Husaini Usman dan *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004),

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990,

Sukur, Suparman, *Etika Religius*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2004).

Susanti, Rosi, “Perjuangan HTI Dalam Mewujudkan Khilafah Islamiyah (Analisis Terhadap Aktivitas Akhwat HTI Mahasiswi UIN Suska Riau Periode 2013-2014)”. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2014,

Syam, Syafruddin, *Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia*,

Syariati, Ali, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012),

Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003,

Tusriyanto, “Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab”, dalam *Jurnal Akademika*, Vol. 19, No. 01, Januari -Juni 2014.

Ulfah, Maria, *Imamah atau Khilafah*, (Jakarta; Institut Ilmu Al-quran),

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Yunus, Mahmud, *Qamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penatfsir al-Qur'an, Cet. ke-1, 1973,



